

**KERTAS KERJA PENGAWASAN (KKP)**

<b>SKPD</b>	Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman	<b>No. Indek KKP</b>	<b>( 1 )</b>
		Disusun oleh/Tanggal	<b>( 2 )</b>
		Direvisi oleh/Tanggal	<b>( 3 )</b>
		Disetujui oleh/Tanggal	<b>( 4 )</b>
<b>Nama SKPD</b>	Badan Pengelola Keuangan Daerah		
<b>Hasil Pengawasan</b>	Lisa Sefita		
<b>a</b>	<p><b>Ketersediaan Lembar GBS</b>                  Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman sudah melampirkan Data Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di implementasikan pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.</p>		
<b>b</b>	<p><b>Kualitas GBS</b>                  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor bertujuan agar tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor dan kenyamanan pegawai dalam bekerja.</p> <p>Data Pembuka Wawasan telah menggambarkan Analisa Situasi tentang pentingnya kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor dan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor untuk kenyamanan pegawai dalam bekerja</p> <p>Faktor kesenjangan dalam program ini adalah :</p> <p>a). Akses, sarana dan prasarana gedung kantor yang belum mencukupi kebutuhan pegawai usia produktif</p> <p>Sebab kesenjangan Internal karena : kurangnya pemahaman pemangku kepentingan tentang pentingnya perlindungan hak-hak pegawai usia produktif dan keterbatasan dukungan anggaran untuk memprioritaskan kebutuhan pegawai usia produktif serta keterbatasan dukungan anggaran untuk memprioritaskan kebutuhan pegawai usia produktif dalam design gedung kantor</p> <p>Kesenjangan eksternal yang terdapat pada BPKD adalah : belum adanya aturan yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan pegawai usia produktif dalam hal sarana dan prasarana gedung kantor.</p> <p>Reformulasi tujuan sudah mulai relevan dan Rencana Aksi sudah Relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan</p> <p>Basis Data yang disadur dari Data Pembuka Wawasan sudah Relevan</p> <p>Indikator kinerja yang ditampilkan sudah relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menampilkan Input, Output dan Hasil dari Kegiatan Tersebut</p>		
<b>c</b>	<p><b>Pelaksanaan GBS</b>                  Indikator Ouput sudah bisa dicapai melihat dari :                  Target sudah sesuai dengan Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Program dan Kegiatan                  Pencapaian target sudah didukung dengan penyediaan dana atau input sebesar Rp150.000.000,00                  sasaran kegiatan sudah sesuai dengan isu gender dilihat pada data pembuka wawasan yang ada pada GAP</p>		
<b>Simpulan</b>	Dapat disimpulkan pada BPBD Ketersedian GBS, Kualitas dan Pelaksanaan GBS sudah baik dibuktikan dengan GAP yang sudah Relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan.		
<b>Komentar</b>	Data GAP yang ditampilkan sudah Relevan dengan Kegiatan.		

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

KPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
 AHUN : 2019

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama / Program / Kegiatan	Data Pembukaan Wawasan	Faktor Kesenjangan	ISU GENDER		Reformasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-line)	Indikator Kinerja
			Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal				
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Banyaknya pasargan suami istri yang bekerja - Pegawai BPKD rata-rata perempuan dan berusia produktif - Pengelola keuangan yang datang untuk berurusan ke BPKD rata-rata perempuan dan berusia produktif - Belum terukupinya kebutuhan atas fak-hak pegawai usia produktif - Perlu nya ketersediaan Sarana dan Prasarana bagi pemenuhan kebutuhan pegawai	- Sarana dan prasarana gedung kantor yang belum mencukupi kebutuhan pegawai usia produktif	- Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan tentang pentingnya perlindungan hak-hak pegawai usia produktif - Keterbatasan dukungan anggaran untuk memprioritaskan kebutuhan pegawai usia produktif dalam design gedung kantor	- Belum adanya aturan yang memungkinkan pentingnya pemenuhan kebutuhan pegawai usia produktif dalam hal sarana dan prasarana gedung kantor	- Meningkatkan sarana dan prasarana serta kenyamanan pegawai dalam bekerja	- Menyediakan ruangan Laktasi - Menyediakan ruangan bermain anak - Menyediakan tempat penitipan anak	- Merencanakan dari menyiapkan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan pegawai usia produktif	Kegiatan : 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Input : Rp 100.000.000,00 Output : Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor
Kegiatan : 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tujuan : Ketersediaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor dan Kenyamanan Pegawai dalam Bekerja							Outcome : Peralatan gedung kantor yang memadai 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Input : Rp 50.000.000,00 Output : Jenis pemeliharaan gedung kantor Outcome : Kenyamanan pegawai dalam bekerja

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
 Kabupaten Padang Pariaman  
 Badan Pengelola Keuangan Daerah  
 Padang Pariaman  
 H. HANIKAT, S.E., M.M.  
 Pembina/Usaha Lokal/ANP. 19610217 198903 1 004  
 Padang, 27 Maret 2019

**KERTAS KERJA PENGAWASAN (KKP)**

<b>SKPD</b>	Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman	No. Indek KKP	( 1 )
		Disusun oleh/Tanggal	( 2 )
		Direvisi oleh/Tanggal	( 3 )
		Disetujui oleh/Tanggal	( 4 )
<b>Nama SKPD</b>	Dinas Kesehatan		
<b>Hasil Pengawasan</b>			
<b>a</b>	<p><b>Ketersediaan Lembar GBS</b> Dinas Kesehatan Sudah Melampirkan Data Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) Pada Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dan di implementasikan pada Kegiatan Pengembangan media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat</p>		
<b>b</b>	<p><b>Kualitas GBS</b> Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan Program Prioritas Kabupaten Padang Pariaman dalam bidang kesehatan untuk mencapai Indikator Kinerja dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah RPJMD dan RKPd. Tujuan dari kegiatan ini adalah menurunkan tingkat Polusi asap rokok diruang pelayanan Publik, Masyarakat dan Perkantoran</p> <p>Data Pembuka wawasan pada langkah 2 yang disampaikan sudah menampilkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin antara laki laki dan perempuan</p> <p>Langkah 3 sudah menampilkan dan menerapkan Perencanaan Penganggaran yang Responsif terhadap Isu Gender, ini dapat dilihat dari 4 Faktor Kesenjangan yang disajikan yaitu Akses , Partisipasi, Kontrol dan Manfaat saling terkait dan mendukung.</p> <p>Langkah 4 Faktor kesenjangan Gender yang datang dari Internal sudah relevan / sudah sesuai</p> <p>Langkah 5 Faktor kesenjangan Gender yang datang dari Eksternal sudah relevan dan ada keterkaitan dengan tujuan kegiatan serta Program Pelaksanaan GBS ini.</p> <p>Langkah 6 dan 7 Reformulasi tujuan dan Rencana Aksi sudah relevan dengan Kegiatan karena sudah merujuk pada tujuan yang responsif Gender untuk mengatasi kesenjangan dan penyebabnya yang ada di langkah 3,4 dan 5</p> <p>Langkah 8 Basis Data yang ditampilkan sudah relevan dengan data pembuka wawasan dan relevan dengan tujuan dan dapat diukur.</p> <p>Langkah 9 Indikator kinerja yang di sajikan berorientasikan out put dan Out come yang dapat mengatasi kesenjangan Gender di langkah 3,4 dan 5</p>		
<b>c</b>	<p><b>Pelaksanaan GBS</b> Pelaksanaan GBS pada Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar Hidup sehat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-</p>		
<b>Simpulan</b>			
Pelaksanaan GBS pada Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar Hidup sehat sudah Relevan dengan Isu Gender dan sesuai dengan proses perencanaan yang responsif. Analisis situasi sudah menyajikan data yang relevan, baik berupa data terpilah atau data spesifik			
<b>Komentar</b>			
Data yang disajikan dalam GAP dan GBS ini sudah Relevan maka dapat direkomendasikan penyajian data GAP dan GBS sudah baik			

## GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

<b>Langkah 1</b>	<b>SKPD</b>	Dinas Kesehatan Kab. Padang Pariaman
	<b>Program Kegiatan Tujuan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>• Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat</li> <li>• Munurunnya tingkat polusi asap rokok di ruang pelayanan publik, masyarakat dan perkantoran</li> </ul>
<b>Langkah 2</b>	<b>Data Pembuka Wawasan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merokok sangat berbahaya bagi kesehatan,</li> <li>• Rendahnya tingkat Partisipasi peserta Laki-laki dalam kegiatan sosialisasi mengenai bahaya asap rokok</li> <li>• Rendahnya Kesadaran laki-laki dalam memanfaatkan kawasan bebas rokok/Smoking Area di Ruang Publik dan Kawasan Perkantoran</li> <li>• Data Dinas Kesehatan perokok pria lebih banyak dibanding perokok wanita yaitu 70% banding 30%</li> <li>• Jumlah Peserta Pelatihan didominasi oleh perempuan lebih dari 85%</li> <li>• Perlunya Sosialisasi Perda No. 4 Tahun 2017 secara merata.</li> </ul>
<b>Langkah 3</b>	<b>IS U G E N D E</b> <b>Faktor Kesenjangan/ Permasalahan Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laki-laki enggan menerima informasi mengenai bahaya merokok dan kurang memahami PHBS rumah tangga khususnya</li> <li>- indikator merokok didalam rumah</li> </ul> </li> <li>• Partisipasi             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya partisipasi laki-laki dlm mengikuti sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya asap rokok (menutup diri terhadap informasi tersebut)</li> </ul> </li> <li>• Kontrol             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya tingkat keberanian lingkungan sekitar (perempuan) untuk melarang anggota keluarga, rekan kerjanya yang merokok (laki-laki)</li> </ul> </li> <li>• Manfaat             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lingkungan akan lebih bersih karena bebas dari asap rokok dan meminimalisir berbagai penyakit yang diakibatkan oleh asap rokok</li> </ul> </li> </ul>

Langkah 4	Sebab Kesenjangan Internal (di SKPD)	<input type="checkbox"/> Perencanaan kegiatan dan pengalokasian anggaran belum semua berdasarkan permasalahan yg ada (basic data) masih meneruskan kegiatan tahun sebelumnya : <u>(harus spesifik) belum berangkat dari data dan fakta yang ada dilapangan, Harus mengundang pelaku, Tidak Ada pembahasan lintas sektor (Masih Kurang)</u>
Langkah 5	Sebab Kesenjangan External	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya asap rokok</li> <li>- Perda No. 4 Tahun 2017 belum sampai ke masyarakat</li> </ul>
Langkah 6	Tujuan	Tingkat kesehatan Perempuan dan Anak-anak/Masyarakat meningkat
Langkah 7	Rencana Aksi Prioritas/Kegiatan/Indikator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi lintas sektor (seperti Bag.Hukum, Bappelitbangda, TAPD)</li> <li>• Merancang undangan untuk sosialisasi sehingga waktu pelaksanaan bisa dihadiri oleh semua undangan terutama laki-laki yang selama ini tidak tertarik untuk hadir (di luar jam kerja)</li> <li>• Surat Edaran dari Kepala Daerah/Kepala OPD yang berisi instruksi langsung kepada Para Tokoh Masyarakat tentang kewajiban untuk menghadiri undangan sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya asap rokok</li> <li>• Penyebaran informasi kawasan tanpa rokok di sekolah, kawasan publik, perkantoran dll</li> </ul>
Langkah 8	<b>Pe ng uk ur an H as il</b> <b>Baseline</b> Rendahnya Kesadaran laki-laki dalam memanfaatkan kawasan bebas rokok/Smoking Area di Ruang Publik dan Kawasan Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capaian indikator PHBS Rumah Tangga di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 sebesar 70,6% (dari target 75%)</li> <li>• Peningkatan papan informasi, leaflet dan talkshow yang berhubungan dengan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)</li> </ul>

Langkah 9	Indikator Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Output Terlaksananya sosialisasi tentang Bahaya asap rokok dan penetapan Perda kawasan tanpa asap rokok <u>Banyaknya laki laki menjadi peserta sosialisasi</u></li> <li>- Outcome Meningkatnya wawasan dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya asap rokok dan semakin banyaknya kawasan bebas asap rokok <u>Menurunnya perokok di dalam keluarga/ di rumah</u> <u>Menurunnya tingkat polusi udara akibat</u></li> </ul>
-----------	-------------------	---

Penanggung Jawab Kegiatan,  
Parit Malintang, Februari 2019  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Padang Pariaman



(Drs. Yulardy Rivai, Apt)

Pembina Utama Muda NIP.19630905 199003 1 001

**KERTAS KERJA PENGAWASAN (KKP)**

<b>SKPD</b>	Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman	No. Indek KKP	( 1 )
		Disusun oleh/Tanggal	( 2 )
		Direvisi oleh/Tanggal	( 3 )
		Disetujui oleh/Tanggal	( 4 )

<b>Nama SKPD</b>	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>Asal Pengawasan</b>	

- a** **Ketersediaan Lembar GBS**  
 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sudah Melampirkan Data Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) Pada Program Pelayanan dan rehabilitasi Sosial dan di implementasikan pada Kegiatan Pelayanan Psikologi Bagi PMKS di Trauma Center termasuk bagi korban bencana
- b** **Kualitas GBS**  
 Program Pelayanan dan rehabilitasi Sosial merupakan Program Prioritas Kabupaten Padang Pariaman untuk mencapai indikator dibidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kegiatan ini bertujuan untuk Penyandang PMKS dan korban bencana dapat dilayani dan terjadi pemulihan Trauma bagi korban bencana
- Data Pembuka wawasan pada langkah 2 yang disampaikan belum menampilkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin antara laki laki dan perempuan
- Langkah 3 sudah menampilkan dan menerapkan Perencanaan Penganggaran yang Responsif terhadap isu Gender, ini dapat dilihat dari 4 Faktor Kesenjangan yang disajikan, Faktor kesenjangan dalam Program ini adalah :  
 a) Akses : Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Korban bencana selalu tergantung kepada Bantuan  
 b) Partisipasi : Rendahnya partisipasi Masyarakat dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) dan korban bencana  
 c) Kontrol : Kurangnya perhatian para Donatur dan pemangku kepentingan kebijakan untuk membangun lembaga Kesejahteraan Sosial seperti panti panti sosial  
 d) Manfaat : Penyandang Masalah Kesejahteraan dan korban bencana dapat menikmati hasil Pembangunan
- Langkah 4 Faktor kesenjangan Gender yang datang dari internal sudah relevan / sudah sesuai dengan GAP dan menyangkut akses, partisipasi, kontrol dan manfaat sehingga menjadi dasar adanya kesenjangan internal
- Langkah 5 Faktor kesenjangan Gender yang datang dari Eksternal sudah relevan dan ada keterkaitan dengan tujuan kegiatan serta Program Pelaksanaan GBS ini. Faktor kesenjangan Eksternalnya adalah : 1. Kurangnya perhatian Masyarakat dan LSM tentang penanganan masalah PMKS dan Korban bencana 2. tidak semua masyarakat/ orang berjiwa Sosial
- Langkah 6 dan 7 Reformulasi tujuan dan Rencana Aksi sudah relevan dengan Kegiatan karena sudah merujuk pada tujuan yang responsif Gender untuk mengatasi kesenjangan dan penyebabnya yang ada di langkah 3,4 dan 5
- Langkah 8 Basis Data yang ditampilkan sudah relevan dengan data pembuka wawasan dan relevan dengan tujuan dan dapat diukur.
- Langkah 9 indikator kinerja yang di sajikan sudah relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan berorientasikan out put dan Out come yang dapat mengatasi kesenjangan Gender di langkah 3,4 dan 5
- c** **Pelaksanaan GBS**  
 Indikator Output sudah bisa dicapai melihat dari : Target sudah sesuai dengan Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Program dan Kegiatan Pencapaian target sudah didukung dengan penyediaan dana atau input sebesar RP. 78.800.000 sasaran kegiatan sudah sesuai dengan isu gender dilihat pada data pembuka wawasan yang ada pada GAP

<b>Simpulan</b>	Dapat disimpulkan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ketersediaan GBS, Kualitas dan Pelaksanaan GBS sudah baik dibuktikan dengan GAP yang sudah Relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan.
<b>Komentar</b>	Data yang disajikan dalam GAP dan GBS ini sudah Relevan maka dapat direkomendasikan penyajian data GAP dan GBS sudah baik

**KERTAS KERJA PENGAWASAN (KKP)**

<b>Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman</b>	No. Indek KKP	( 1 )
	Disusun oleh/Tanggal	( 2 )
	Direvisi oleh/Tanggal	( 3 )
	Disetujui oleh/Tanggal	( 4 )
<b>Nama SKPD</b>	<b>Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	
<b>Hasil Pengawasan</b>		
<b>a</b>	<p><b>Ketersedian Lembar GBS</b>                  Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sudah Melampirkan Data Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) Pada Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dan di implementasikan pada Kegiatan Penyuluhan Gerakan Nasional Anti kekerasan Seksual terhadap anak (GN-AKSA)</p>	
<b>b</b>	<p><b>Kualitas GBS</b>                  Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan merupakan Program Prioritas Kabupaten Padang Pariaman untuk mencapai Indikator dibidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kegiatan ini bertujuan Tindakan Preventif dalam rangka mengurangi angka kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Padang Pariaman</p> <p>Data Pembuka wawasan pada langkah 2 yang disampaikan belum menampilkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin antara laki laki dan perempuan</p> <p>Langkah 3 belum menampilkan dan menerapkan Perencanaan Penganggaran yang Responsif terhadap isu Gender, ini dapat dilihat dari 4 Faktor Kesenjangan yang disajikan, Faktor kesenjangan dalam Program ini adalah :                  a) Akses : Berpakaian tidak sesuai syariat, Kurangnya keimanan pelaku kejahatan Seksual b) Partisipasi : Siswa / Anak tidak diberikan ruang dalam menyampaikan aspirasinya c) Kontrol : Minimnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, kurangnya ketahanan Keluarga d) Manfaat : Rendahnya pemahaman Masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap anak</p> <p>Langkah 4 Faktor kesenjangan Gender yang datang dari internal kurang relevan dengan GAP dan menyangkut akses, partisipasi, kontrol dan manfaat sehingga menjadi dasar adanya kesenjangan internal</p> <p>Langkah 5 Faktor kesenjangan Gender yang datang dari Eksternal sudah relevan dan ada keterkaitan dengan tujuan kegiatan serta Program Pelaksanaan GBS ini. Faktor kesenjangan Eksternalnya adalah : 1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan karena merasa aib keluarga 2. Kurangnya Koordinasi dengan lintas sektoral 3. Mudahnya anak - anak dalam mengakses situs Pornografi</p> <p>Langkah 6 dan 7 Reformulasi tujuan dan Rencana Aksi sudah relevan dengan Kegiatan karena sudah merujuk pada tujuan yang responsif Gender untuk mengatasi kesenjangan dan penyebabnya yang ada di langkah 3,4 dan 5</p> <p>Langkah 8 Basis Data yang ditampilkan tidak relevan dengan data pembuka wawasan sehingga tujuan tidak dapat diukur.</p> <p>Langkah 9 Indikator kinerja yang di sajikan sudah relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan berorientasikan out put dan Out come yang dapat mengatasi kesenjangan Gender di langkah 3,4 dan 5</p>	
<b>c</b>	<p><b>Pelaksanaan GBS</b>                  Indikator Ouput sudah bisa dicapai melihat dari : Target sudah sesuai dengan Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Program dan Kegiatan Pencapaian target sudah didukung dengan penyediaan dana atau input sebesar RP. 46.000.000</p>	
<b>Simpulan</b>		
<p>Dapat disimpulkan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ketersedian GBS, Kualitas dan Pelaksanaan GBS masih kurang baik dibuktikan dengan GAP yang masih belum Relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan.</p>		
<b>Komentar</b>		
<p>Data yang disajikan dalam GAP dan GBS ini sudah masih belum Relevan maka dapat direkomendasikan penyajian data GAP dan GBS masih kurang baik</p>		

**KERTAS KERJA PENGAWASAN (KKP)**

Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman

No. Indek KKP	( 1 )
Disusun oleh/Tanggal	( 2 )
Direvisi oleh/Tanggal	( 3 )
Disetujui oleh/Tanggal	( 4 )

**Nama SKPD** Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Hasil Pengawasan**

- a** **Ketersediaan Lembar GBS**  
 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman sudah melampirkan Data Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) Pada Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan di implementasikan pada Kegiatan Sosialisasi PUG dan PPRG
- b** **Kualitas GBS**  
 Secara kualitas kegiatan Sosialisasi PUG dan PPRG, Kegiatan Bimtek GAP dan GBS bagi Vokal Point, Kegiatan PPRG bagi Driver dan APIP merupakan kegiatan strategis dan ujung tombak dari pemahaman OPD tentang PPRG dan PUG, meningkatkan kemampuan Vokal Point dalam menyusun GAP dan GBS terhadap perencanaan anggaran serta terlaksananya Bimtek PPRG bagi Tim Driver dan APIP.  
 Kegiatan-kegiatan ini juga mendukung pencapaian tujuan program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Kegiatan tersebut termuat dalam RPJMD dan RKPD serta Renstra dan Renja SKPD yang bersangkutan.  
 Data Pembuka Wawasan telah menggambarkan Analisa Situasi tentang pentingnya Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender  
 Faktor kesenjangan dalam program ini adalah :  
 a). Akses, dimana belum tersedianya anggaran yang memadai dan kurangnya pemahaman OPD mengenai PUG dan PPRG.  
 b). Partisipasi, dalam hal ini kurang tanggapnya OPD tentang pentingnya PUG dan PPRG dalam pelaksanaan Pembangunan.  
 c). Kontrol, kurangnya minat keikutsertaan Kepala OPD dalam mengikuti Sosialisasi PUG dan PPRG.  
 d). Manfaat, dimana penerapan PUG dan PPRG belum menjadi prioritas  
 Sebab kesenjangan Internal karena : Kegiatan PPRG dan PUG merupakan kegiatan baru, keterbatasan data terkait dengan PPRG dan PUG, keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM dan kurangnya evaluasi kegiatan hal ini telah relevan dengan GAP dan menyangkut akses, partisipasi, kontrol dan manfaat sehingga menjadi dasar adanya kesenjangan internal.  
 Kesenjangan eksternal yang terdapat pada Dinsos P3A adalah sebagai berikut : kurangnya pemahaman kepala OPD tentang PUG dan PPRG, kurang peduliya OPD mengenai PPRG dan PUG, PPRG dan PUG tidak menjadi skala prioritas hal ini telah relevan dengan GBS namun langkah - langkah penyelesaian kesenjangan belum terlihat.  
 Reformulasi tujuan sudah mulai relevan dan Rencana Aksi sudah Relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta/OPD terkait PPRG dan PUG.  
 Basis Data yang disadur dari Data Pembuka Wawasan sudah Relevan  
 Indikator kinerja yang ditampilkan sudah relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menampilkan Input, Output dan Hasil dari Kegiatan tersebut
- c** **Pelaksanaan GBS**  
 Indikator Ouput sudah bisa dicapai melihat dari :  
 Target sudah sesuai dengan Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Program dan Kegiatan  
 Pencapaian target sudah didukung dengan penyediaan dana atau input sebesar RP. 263.950.000  
 sasaran kegiatan sudah sesuai dengan isu gender dilihat pada data pembuka wawasan yang ada pada GAP

**Simpulan**

Dapat disimpulkan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ketersediaan GBS, Kualitas dan Pelaksanaan GBS sudah baik dibuktikan dengan GAP yang sudah Relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan.

**Komentar**

Data GAP yang ditampilkan sudah Relevan dengan Kegiatan namun masih ada masalah internal yang ditemui disebabkan keterbatasan data terkait dengan PPRG dan PUG, keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM dan kurangnya evaluasi kegiatan. Untuk mengatasi hal tersebut, disarankan kepada Kepala Dinsos P3A untuk melakukan langkah-langkah antara lain : Meningkatkan sosialisasi tentang PPRG dan PUG di seluruh OPD dan Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, mengoptimalkan fungsi Tim Driver dan Vokal Point untuk peningkatan kualitas PPRG dan PUG, Dinsos P3A sebagai Leading Sector harus mampu menyakinkan Pimpinan untuk peningkatan sarana prasarana, anggaran dan SDM untuk pelaksanaan PPRG dan PUG.

## KERTAS KERJA PENGAWASAN (KKP)

Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman	No. Indek KKP	( 1 )
	Disusun oleh/Tanggal	( 2 )
	Direvisi oleh/Tanggal	( 3 )
	Disetujui oleh/Tanggal	( 4 )
Nama SKPD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Hasil Pengawasan		
a	<p><b>Ketersediaan Lembar GBS</b></p> <p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman sudah melampirkan Data Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) Pada Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan di implementasikan pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas PSKS dalam Kesiapsiagaan Bencana</p>	
b	<p><b>Kualitas GBS</b></p> <p>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial merupakan Program Prioritas Kabupaten Padang Pariaman untuk mencapai indikator dibidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kegiatan ini bertujuan untuk para relawan Sosial dan PSKS selalu siap dalam menghadapi bencana baik bencana alam maupun bencana lainnya dan masyarakat selalu siap dalam menghadapi bencana. Kegiatan-kegiatan ini juga termuat dalam RPJMD dan RKPD serta Renstra dan Renja SKPD yang bersangkutan.</p> <p>Data Pembuka Wawasan telah menggambarkan Analisa Situasi tentang pentingnya Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</p> <p>Langkah 3 Faktor kesenjangan dalam program ini adalah :</p> <p>a). Akses, Sangat sulit bagi generasi muda/ masyarakat untuk menjadi relawan Sosial karena relawan Sosial tidak digaji b). Partisipasi, Rendahnya kemauan generasi muda/Masyarakat untuk menjadi relawan Sosial terutama penanggulangan bencana. c). Kontrol, Rendahnya pengetahuan Masyarakat tentang daerah rawan bencana, karena masyarakat kurang memperhatikan daerah rawan terhadap bencana. d). Manfaat, Masyarakat akan selalu waspada terhadap ancaman bencana dan mempunyai keterampilan dalam upaya penanggulangan bencana</p> <p>Langkah 4 Sebab kesenjangan Internal karena : Perencanaan Kegiatan dan pengalokasian anggaran belum semua berdasarkan permasalahan yang ada karena masih meneruskan kegiatan sebelumnya. Pada umumnya kegiatan yang dilahirkan belum berangkat dari data yang ada dilapangan sebelum melahirkan program dan kegiatan harus dilakukan pembahasan dengan lintas sektor terkait. kegiatan hal ini telah relevan dengan GAP dan menyangkut akses, partisipasi, kontrol dan manfaat sehingga menjadi dasar adanya kesenjangan internal.</p> <p>Langkah 5 Faktor kesenjangan Gender yang datang dari Eksternal sudah relevan dan ada keterkaitan dengan tujuan kegiatan serta Program Pelaksanaan GBS ini. Faktor kesenjangan Eksternalnya adalah : 1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peringatan dini kejadian bencana sehingga pada saat kejadian bencana masyarakat tidak siap 2. tidak adanya tanda tanda untuk peringatan dini kejadian bencana</p> <p>Langkah 6 dan 7 Reformulasi tujuan dan Rencana Aksi sudah relevan dengan Kegiatan karena sudah merujuk pada tujuan yang responsif Gender untuk mengatasi kesenjangan dan penyebabnya yang ada di langkah 3,4 dan 5</p> <p>Langkah 8 Basis Data yang ditampilkan sudah relevan dengan data pembuka wawasan dan relevan dengan tujuan dan dapat diukur.</p> <p>Indikator kinerja yang ditampilkan sudah relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menampilkan Output dan Out come dari Kegiatan Tersebut</p>	
c	<p><b>Pelaksanaan GBS</b></p> <p>Indikator Output sudah bisa dicapai melihat dari : Target sudah sesuai dengan Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Program dan Kegiatan Pencapaian target sudah didukung dengan penyediaan dana atau input sebesar RP. 55.000.000 sasaran kegiatan sudah sesuai dengan isu gender dilihat pada data pembuka wawasan yang ada pada GAP</p>	
<b>Simpulan</b>		
Dapat disimpulkan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ketersediaan GBS, Kualitas dan Pelaksanaan GBS sudah baik dibuktikan dengan GAP yang sudah Relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan.		
<b>komentar</b>		
Data yang disajikan dalam GAP dan GBS ini sudah Relevan maka dapat direkomendasikan penyajian data GAP dan GBS sudah baik		

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<b>Nama Kegiatan/Program/ Kegiatan</b>	<b>Data Pembuka Wawasan</b>	<b>Faktor Kesenjangan</b>	<b>ISU GENDER</b> Sebab Kesenjangan Internal	<b>Sebab Kesenjangan Eksternal</b>	<b>KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN</b> Reformulasi Tujuan	<b>Rencana Aksi</b>	<b>PENGUKURAN HASIL</b> Basis Data (Base-Line)	<b>Indikator Kinerja</b>
<b>PERBAIKAN GAP SETELAH VERIFIKASI</b>								
<b>PROGRAM :</b> Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	- Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam pembangunan. - kurangnya pemahaman OPD tentang PUG dan PPRG	<b>Akses:</b> - Belum tersedianya anggaran yang memadai - Pemahaman OPD mengenai PUG dan PPRG. <b>Partisipasi:</b> Kurang tanggapnya masing-masing OPD tentang pentingnya PUG dan PPRG dalam pelaksanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan PUG dan PPRG merupakan kegiatan baru.</li> <li>• Keterbatasan data terkait dengan PUG dan PPRG</li> <li>• Keterbatasan anggaran</li> <li>• Keterbatasan SDM</li> <li>• Kurangnya evaluasi kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pemahaman Kepala OPD tentang PUG dan PPRG</li> <li>• Kurangnya kepedulian OPD mengenai PUG dan PPRG.</li> <li>• PUG dan PPRG tidak menjadi skala prioritas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Penguasaan dan Pemahaman Peserta/OPD terkait PUG dan PPRG</li> <li>• Meningkatkan SDM Pokja PUG</li> <li>• Meningkatkan Vocal Point PUG.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi PUG dan PPRG</li> <li>• Penilaian APE.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman OPD mengenai PUG dan PPRG</li> <li>• Tersedianya data terpadu untuk menunjang kegiatan di OPD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kegiatan 1:</b> Sosialisasi PUG dan PPRG</li> <li>• <b>Input :</b> Rp. 25.000.000</li> <li>• <b>Output:</b> Jumlah OPD yang telah mengikuti sosialisasi PUG dan PPRG</li> <li>• <b>Outcome:</b> Meningkatkan pemahaman OPD tentang PUG dan PPRG</li> <li>• <b>Kegiatan 2:</b> Birtek GAP dan GBS bagi Vocal Point</li> <li>• <b>Input :</b> Rp. 131.700.000</li> <li>• <b>Output:</b> Jumlah Vocal Point yang mengikuti Birtek.</li> <li>• <b>Outcome:</b> Meningkatnya kemampuan Vocal Point dalam menyusun GAB</li> </ul>
<b>KEGIATAN:</b> Sosialisasi PUG dan PPRG	- OPD di Kabupaten Padang Pariaman masih belum menerapkan Pengarusutamaan Gender dan PPRG. - Peserta Sosialisasi PUG dan PPRG terdiri dari 60 OPD di Kabupaten Padang Pariaman							
<b>TUJUAN:</b> Meningkatkan Penguasaan dan Pemahaman Peserta/OPD terkait PUG dan PPRG								

## GENDER ANALYSIS PATHWAY ( GAP )

Langkah 1	<p style="text-align: center;">OPD</p> <p>Program Kegiatan Tujuan</p>	<p>Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman</p> <p>Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial</p> <p>Pelayanan Psikologi Bagi PMKS Di Trauma Center Termasuk Bagi Korban Bencana</p> <p>Penyandang PMKS dan Korban Bencana dapat dilayani dan Terjadi Pemulihan Trauma Bagi Korban Bencana</p>
Langkah 2	<p>Data Pembuka Wawasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Masih Tinggi</li> <li>2. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Belum maksimal</li> <li>3. Rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam penanganan masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</li> <li>4. Tidak adanya pusat-pusat pemulihan trauma bagi PMKS dan Korban Bencana</li> </ol>
Langkah 3	<p>Faktor Kesenjangan</p> <p>1 Permasalahan Akses, Partisipasi S Kontrol, Manfaat</p> <p>U</p> <p>G</p> <p>E</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan korban bencana selalu tergantung kepada bantuan</li> <li>2. Partisipasi Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Korban Bencana</li> <li>3. Kontrol Kurangnya perhatian para donatur dan pemangku kebijakan untuk membangun Lembaga Kesejahteraan Sosial seperti Panti-Panti Sosial</li> <li>4. Manfaat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Korban Bencana dapat menikmati hasil pembangunan</li> </ol>
Langkah 4	<p>D Sebab Kesenjangan Internal (di OPD)</p> <p>E</p> <p>R</p>	<p>Perencanaan kegiatan dan pengalokasian anggaran belum semua berdasarkan permasalahan yang ada, karena masih meneruskan kegiatan sebelumnya.</p> <p>Pada umumnya kegiatan yang dilahirkan belum berangkat dari data yang ada dilapangan sebelum melahirkan program dan kegiatan harus dilakukan pembahasan dengan lintas sektor yang terkait.</p>
Langkah 5	<p>Sebab Kesenjangan Eksternal</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya perhatian masyarakat dan LSM tentang Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Korban Bencana</li> <li>2. Tidak semua orang/masyarakat berjiwa sosial</li> </ol>
Langkah 6	<p>Tujuan</p>	<p>Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Korban Bencana menikmati program Pembangunan</p>
Langkah 7	<p>Rencana Aksi Prioritas/Kegiatan/ Indikator (Menja - wab langkah 4 dan - 5 ) <u>Menyelesaikan</u> <u>Kesenjangan</u> <u>Yang Tertuana</u> <u>dalam Langkah 4</u> <u>dan langkah 5</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan rapat koordinasi lintas sektor (Bappeda, Bagian Kesra dan Instansi yang terkait lainnya</li> <li>2. Membuat surat Edaran Kepala Daerah / Kepala OPD yang berisikan kepedulian terhadap penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan korban bencana</li> <li>3. Mengalokasikan dana melalui APBD untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Korban Bencana</li> <li>4. Membuat brosur-brosur dan Informasi tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Korban Bencana yang disebarakan melalui pusat-pusat keramaian dan kawasan perkantoran</li> </ol>

## GENDER ANALYSIS PATHWAY ( GAP )

Langkah 1	<p style="text-align: center;"><b>SKPD</b></p> <p>Program Kegiatan Tujuan</p>	<p>Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman</p> <p>Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</p> <p>Peningkatan Kapasitas PSKS dalam Kesiapsiagaan Bencana</p> <p>Pada relawan sosial dan PSKS selalu siap dalam menghadapi ancaman bencana baik bencana alam maupun bencana lainnya. Dan masyarakat selalu siap dalam menghadapi bencana.</p>
Langkah 2	<p>Data Pembuka Wawasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bencana sangat mengancam jiwa manusia dan merusak alam</li> <li>2. Terdapat 5 titik Daerah Rawan Bencana</li> <li>3. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana terutama pada masa tanggap darurat.</li> <li>4. Kurangnya pilar-pilar sosial dalam upaya penanggulangan bencana</li> <li>5. Data Dinas Sosial untuk Kabupaten Padang Pariaman hanya ada 30 orang Tagana.</li> </ol>
Langkah 3	<p>Faktor Kesenjangan</p> <p>1. Permasalahan Akses, Partisipasi</p> <p>2. Kontrol, Manfaat</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>9.</p> <p>10.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akses Sangat sulit bagi generasi muda/masyarakat untuk menjadi relawan sosial karena relawan sosial tidak digaji</li> <li>2. Partisipasi Rendahnya kemauan generasi muda/masyarakat untuk menjadi relawan sosial terutama penanggulangan bencana</li> <li>3. Kontrol Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang daerah rawan bencana, karena masyarakat kurang memperhatikan daerah rawan terhadap bencana</li> <li>4. Manfaat Masyarakat akan selalu waspada terhadap ancaman bencana, dan mempunyai keterampilan dalam upaya penanggulangan bencana</li> </ol>
Langkah 4	<p>Sebab Kesenjangan Internal (di OPD)</p>	<p>Perencanaan kegiatan dan pengalokasian anggaran belum semua berdasarkan permasalahan yang ada, karena masih meneruskan kegiatan sebelumnya.</p> <p>Pada umumnya kegiatan yang dilahirkan belum berangkat dari data yang ada di lapangan sebelum melahirkan program dan kegiatan harus dilakukan pembahasan dengan lintas sektor yang terkait.</p>
Langkah 5	<p>Sebab Kesenjangan Eksternal</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peringatan dini kejadian bencana, sehingga pada saat kejadian bencana masyarakat tidak siap.</li> <li>2. Tidak adanya tanda-tanda untuk peringatan dini kejadian bencana.</li> </ol>
Langkah 6	<p>Tujuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat selalu siap dalam menghadapi bencana</li> <li>2. Masyarakat selalu waspada terhadap bencana</li> </ol>
Langkah 7	<p>Rencana Aksi Prioritas/Kegiatan/ Indikator (Menjawab langkah 4 dan 5) <u>Menyelesaikan Kesenjangan Yang Tertuang dalam Langkah 4 dan langkah 5</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan rapat koordinasi lintas sektor (Bappeda, BPPD, Kesbang Pol) dan yang terkait</li> <li>2. Mempersiapkan pertemuan dengan lintas sektor untuk dilakukan sosialisasi tentang upaya penanggulangan bencana dengan melibatkan para relawan sosial</li> <li>3. Membuat surat Edaran Kepala Daerah / Kepala OPD yang berisi selalu waspada dan siap siaga dalam menghadapi bencana</li> <li>4. Membuat brosur-brosur dan informasi tentang penanggulangan bencana dan selalu waspada bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dan informasi ini disebarluaskan kepada masyarakat melalui pusat-pusat pertemuan, dan kawasan perkantoran</li> </ol>

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p><b>PROGRAM :</b> Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan</p> <p><b>KEGIATAN:</b> Penyuluhan Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA)</p> <p><b>TUJUAN:</b> Tindakan preventif dalam rangka mengurangi angka kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Padang Pariaman</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inpres Nomor 5 Tahun 2014 tentang GN- AKSA</li> <li>- Penyebab tingginya tingkat kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Padang Pariaman.</li> <li>- Data kekerasan seksual terhadap anak pada tahun terakhir adalah 24 kasus.</li> <li>- Pada umumnya penyebab seksual terhadap anak dikarenakan pengaruh media social dan kurangnya keimanan.</li> <li>- Jenis kekerasan seksual terhadap anak meliputi perkosaan, pelecehan dan sodomi.</li> <li>- Umumnya yang menjadi korban kekerasan seksual terhadap anak adalah anak SD dan SMP.</li> </ul>	<p><u>Akses</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bertakalan tidak sesuai dengan syariat.</li> <li>- Kurangnya keimanan pelaku kejahatan kekerasan seksual.</li> </ul> <p><u>Partisipasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Siswa/Anak tidak diberi ruang dalam menyampaikan aspirasinya</li> </ul> <p><u>Kontrol</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimnya pengawasan orang tua terhadap anaknya</li> <li>- Kurangnya ketahanan keluarga.</li> </ul> <p><u>Manfaat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketertalasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan sehingga jumlah sekolah yang akan diberikan penyuluhan terbatas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan karena merasa aib keluarga.</li> <li>- Kurangnya koordinasi dengan lintas sector terkait.</li> <li>- Mudahnya anak-anak dalam mengakses situs pornografi.</li> </ul>	<p>Menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyuluhan Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Anak (GN-AKSA)</li> <li>- Pembentukan Forum Anak Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.</li> <li>- Pembentukan Tim Ketahanan Keluarga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada umumnya kekerasan seksual terhadap anak terjadi pada kelompok umur 15 tahun</li> <li>- Jumlah sekolah yang dilakukan penyuluhan GN-AKSA pada tahun terakhir adalah 20 sekolah.</li> </ul>	<p><b>Kegiatan 1:</b> Penyuluhan Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Anak (GN-AKSA)</p> <p><b>Input :</b> Rp. 45.000.000</p> <p><b>Output :</b> Jumlah sekolah yang dilaksanakan penyuluhan GN-AKSA</p> <p><b>Outcome :</b> Menurunnya angka kekerasan seksual terhadap anak</p> <p><b>Kegiatan 2:</b> Pembentukan Kelompok Ketahanan Keluarga di Nagari</p> <p><b>Input:</b> Rp. 135.000.000</p>

**KERTAS KERJA PENGAWASAN (KKP)**

SKPD	Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman	No. Indek KKP	( 1 )
		Disusun oleh/Tanggal	( 2 )
		Direvisi oleh/Tanggal	( 3 )
		Disetujui oleh/Tanggal	( 4 )
<b>Nama SKPD</b>		Dinas Lingkungan Hidup Kawasan Permukiman dan Pertanian	
<b>Hasil Pengawasan</b>			
<b>a</b>	<p><b>Ketersediaan Lembar GBS</b> Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kawasan Permukiman dan Pertanian Kabupaten Padang Pariaman sudah melampirkan Data Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan.</p>		
<b>b</b>	<p><b>Kualitas GBS</b> Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan merupakan Program Prioritas yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kawasan Permukiman dan Pertanian dan menunjang pada Program Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman. Adapun tujuan dari kegiatannya adalah untuk meningkatkan Pengetahuan Pegawai. Kegiatan tersebut telah mencoba untuk menerapkan PPRG, yang dibuktikan dengan tujuan kegiatan diatas</p> <p>Data pembuka wawasan yang disampaikan kurang lengkap dan belum data terpilah yang menggambarkan jumlah/ kelompok pegawai sesuai dengan jenis kelamin, kelompok usia dan tempat tinggal sehingga memudahkan pemetaan Resiko dan penanggulangannya untuk pembinaan dalam PUG.</p> <p>Faktor Kesenjangan yang ditampilkan pada Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sudah selaras dan telah menggambarkan parameter kesetaraan gender. Kebijakan yang mewajibkan dan mengatur pelaksanaan PUG dan kebijakan yang mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan sektor telah ditampilkan pada GAP dan GBS.</p> <p>Sebab kesenjangan Internal seharusnya menggambarkan faktor yang menjadi penghambat internal pada OPD yang akan melaksanakan kegiatan.</p> <p>Kesenjangan eksternal sudah mulai relevan, diharapkan masukan unsur pembuat kebijakan dan OPD terkait untuk mendukung pengarusutamaan gender tersebut melalui kebijakan yang dikeluarkan.</p> <p>Reformulasi tujuan dan Rencana Aksi masih kurang relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan.</p> <p>Basis Data yang disadur dari Data Pembuka Wawasan belum relevan dan belum mengidentifikasi kesetaraan gender.</p> <p>Indikator kinerja yang ditampilkan output yang disajikan kurang relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan namun outcome sudah relevan dengan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan.</p>		
<b>c</b>	<p><b>Pelaksanaan GBS</b> Indikator Ouput bisa dicapai melihat dari : Target dicapai dengan Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Program dan Kegiatan Pencapaian target sudah didukung dengan penyediaan dana atau input sebesar Rp 8.000.000,00 sasaran kegiatan sudah sesuai dengan isu gender dilihat pada data pembuka wawasan yang ada pada GAP</p>		
<b>Simpulan</b>			
		Dapat disimpulkan pada Dinas Lingkungan Hidup Kawasan Permukiman dan Pertanian Kabupaten Padang Pariaman Ketersediaan GBS, Kualitas dan Pelaksanaan GBS sudah baik dibuktikan dengan GAP yang sudah Relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan.	
<b>Komentar</b>			
		Data GAP yang ditampilkan sudah Relevan dengan Kegiatan serta menampilkan data secara terinci.	

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
TAHUN : 2019

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8		Langkah 9
							Pengukuran Hasil		Langkah 9
Nama Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana kedepan		Basis Data (Baseline)	Indikator Kinerja	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana aksi		Kegiatan:	Indikator Kinerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- penganggaran bahan bacaan dilakukan setiap tahun	Akses: Terbatasnya bahan bacaan khusus perempuan	- Jenis bahan bacaan yang disediakan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya	- Ketersediaan akses internet	Meningkatkan keseimbangan terhadap pelayanan perkantoran antara pegawai laki-laki dan perempuan khususnya terhadap penyediaan bahan bacaan	- Melakukan survey pendapat terkait penyediaan bahan bacaan yang sesuai keinginan pegawai laki-laki dan perempuan	- Menambah jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan diupayakan menjembatani kebutuhan perempuan	Kegiatan: Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
Kegiatan: Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- bahan bacaan yang disediakan: Kompas, Singgalang, Padang Ekspres, Majalah Tempo	Partisipasi: - Kurang tersedianya waktu bagi PNS perempuan untuk membaca	- Belum merasakan dampak penyediaan bahan bacaan bagi perempuan	- Dominasi pembaca koran oleh pegawai laki-laki		- Penyediaan bahan bacaan yang diminati pegawai perempuan dan laki-laki		Input: Rp 8.000.000,-	
Tujuan : Meningkatkan pengetahuan pegawai	- Bahan bacaan yang tersedia belum mengakomodir minat pegawai perempuan	- Tingkat intensitas kerja PNS perempuan yang relatif tinggi (Bendahara)		- Ketersediaan televisi mengurangi minat membaca				Output: Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	
	- Jumlah pegawai perempuan 15 orang (36%) dan swakelola perempuan 12 orang	- Belum ada usulan dan pegawai untuk penyediaan bahan bacaan khusus perempuan Kontrol: Jenis bahan bacaan dapat pilih dengan melakukan survey dasar terhadap seluruh pegawai Manfaat:						Outcome: Meningkatkan pengetahuan pegawai	

**KERTAS KERJA PENGAWASAN (KKP)**

SKPD	Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman	No. Indek KKP	(1)
		Disusun oleh/Tanggal	(2)
		Direvisi oleh/Tanggal	(3)
		Disetujui oleh/Tanggal	(4)

**Nama SKPD** Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi dan UKM

**Hasil Pengawasan**

- a Ketersediaan Lembar GBS**  
 Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman sudah melampirkan Data Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) Pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Masyarakat.
  
- b Kualitas GBS**  
 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan keterampilan bagi perempuan yang tidak mampu secara ekonomi.  
  
 Data pembuka wawasan yang disampaikan sudah lengkap dan menggambarkan jumlah kelompok masyarakat yang beresiko serta ditampilkan sesuai dengan jenis kelamin, kelompok usia dan tempat tinggal sehingga memudahkan pemetaan Resiko dan penanggulangannya untuk pembinaan dalam PUG.  
  
 Faktor Kesenjangan yang ditampilkan pada Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja sudah selaras dan telah menggambarkan parameter kesetaraan gender. Kebijakan yang mewajibkan dan mengatur pelaksanaan PUG dan kebijakan yang mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan sektor telah ditampilkan pada GAP dan GBS.  
  
 Sebab kesenjangan Internal menurut Tim Reviu adalah masih kurangnya pemahaman focal point dan pimpinan Dinas Satpol PP dan Damkar tentang hal-hal yang harus dijelaskan pada langkah 3 (faktor kesenjangan) pada GAP dan GBS, sehingga faktor kesenjangan dan sebab kesenjangan internal kurang tepat karena terdapat faktor eksternal pada langkah 3 ini.  
  
 Kesenjangan eksternal sudah mulai relevan namun diharapkan masukan unsur pembuat kebijakan dan dinas terkait yang sudah atau belum mendukung pengarusutamaan gender tersebut secara kebijakan.  
  
 Reformulasi tujuan sudah mulai relevan dengan tujuan kegiatan dan Rencana Aksi sudah Relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta/OPD terkait PPRG dan PUG.  
  
 Basis Data yang disadur dari Data Pembuka Wawasan sudah Relevan namun belum menampilkan data secara terinci.  
  
 Indikator kinerja output dan outcome yang ditampilkan sudah relevan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
  
- c Pelaksanaan GBS**  
 Indikator Ouput sudah bisa dicapai melihat dari :  
 Target sudah sesuai dengan Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Program dan Kegiatan  
 Pencapaian target sudah didukung dengan penyediaan dana atau input sebesar Rp 100.000.000,00  
 sasaran kegiatan sudah sesuai dengan isu gender dilihat pada data pembuka wawasan yang ada pada GAP

**Simpulan**

Dapat disimpulkan pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Ketersedian GBS, Kualitas dan Pelaksanaan GBS sudah baik dibuktikan dengan GAP yang sudah Relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan.

**Komentar**

Data GAP yang ditampilkan sudah Relevan dan menampilkan data secara terinci dimana pada data pembuka wawasan.

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tujuan pembangunan	Akses : Ada syarat yang telah ditentukan	Keterbatasan data yang ada	Ibu Rumah Tangga	Meningkatkan keterampilan bagi perempuan yg tidak mampu secara ekonomi	Melakukan Pendataan terhadap calon yang dilatih	Jumlah yg dilatih 524 orang	Output : Jumlah yang dilatih
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Masyarakat	Jumlah penduduk pdg panaman, ± 427 919	Partisipasi : bebanyang ganda perempuan	Belum semua ASN paham tentang PUG	Yang mencari nafkah suami		Promosi kegiatan pada masyarakat	Jumlah yang sdh berusaha ± 50 orang	Outcome Meningkatkan jumlah perempuan yang berusaha
Meningkatkan keterampilan bagi perempuan yg tidak mampu secara ekonomi	Jml penduduk miskin, 8,46 %	Kontrol :	Keterbatasan wewenang dalam pembinaan lebih lanjut			Jadwal yang disesuaikan		Input : Tersedianya dana pelatihan 100 000.000
	Jumlah penduduk yg bekerja Laki-laki 104 510 orang perempuan 65 259 orang	Manfaat : tidak punya modal	Ibu Rumah Tangga			Rapat-Rapat koordinasi dengan lintas sektoral		
	Jumlah angkatan kerja 131 juta		Yang mencari nafkah suami			Pelatihan peningkatan keterampilan		
	Jumlah yg sdh dilatih 3 tahun terakhir 524 orang					Melaksanakan monitoring terhadap hasil pelatihan		

Peranggung Jawab Kegiatan  
Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM  
Kabupaten Padang Pariaman

H. DEWI ROSLAINI, SE, MM  
NIP. 19670308 199303 0001

**KERTAS KERJA PENGAWASAN (KKP)**

SKPD	Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman	No. Index KKP	( 1 )
		Disusun oleh/Tanggal	( 2 )
		Direvisi oleh/Tanggal	( 3 )
		Disetujui oleh/Tanggal	( 4 )
<b>Nama SKPD</b>		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
<b>Hasil Pengawasan</b>			
a	<p><b>Ketersediaan Lembar GBS</b></p> <p>Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Pariaman sudah melampirkan Data Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada: Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran/ Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran</p>		
b	<p><b>Kualitas GBS</b></p> <p>Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran merupakan Program Prioritas yang ada di Dinas Satpol PP dan Damkar dan menunjang pada Program Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman. Adapun tujuan dari kegiatannya agar terwujudnya masyarakat yang partisipatif dan tangguh bencana kebakaran. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran sudah mencoba untuk menerapkan PPRG, dibuktikan dengan tujuan kegiatan diatas.</p> <p>Data Pembuka Wawasan yang disajikan masih kurang lengkap dimana tidak terdapat jumlah kelompok masyarakat yang beresiko serta tidak ditampilkan sesuai dengan jenis kelamin, kelompok usia dan tempat tinggal, seharusnya data ini disajikan lengkap untuk memudahkan pemetaan Resiko dan penanggulangannya serta untuk pembinaan dalam PUG.</p> <p>Faktor Kesenjangan yang ditampilkan pada Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat pada Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran sudah selaras dan telah menggambarkan parameter kesetaraan gender. Kebijakan yang mewajibkan dan mengatur pelaksanaan PUG dan kebijakan yang mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan sektor telah ditampilkan pada GAP dan GBS.</p> <p>Sebab kesenjangan internal menurut Tim Reviu adalah masih kurangnya pemahaman petugas dan pimpinan Dinas Satpol PP dan Damkar tentang hal-hal yang harus dijelaskan pada langkah 3 (faktor kesenjangan) pada GAP dan GBS, sehingga faktor kesenjangan dan sebab kesenjangan internal kurang tepat.</p> <p>Kesenjangan eksternal masih kurang relevan, diharapkan masukan unsur pembuat kebijakan dan OPD terkait untuk mendukung pengarusutamaan gender tersebut melalui kebijakan yang dikeluarkan.</p> <p>Reformulasi tujuan masih kurang relevan dengan tujuan sedangkan rencana aksi sudah relevan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan namun belum mengidentifikasi kesetaraan gender</p> <p>Basis sudah selaras dengan data pembuka namun belum mengidentifikasi kesetaraan gender</p> <p>Indikator kinerja output dan outcome sudah SMART dan telah mengatasi kesenjangan gender</p>		
c	<p><b>Pelaksanaan GBS</b></p> <p>Indikator Kinerja output dan outcome yang ditetapkan sudah SMART serta telah mengatasi kesenjangan gender baik Internal maupun external</p>		
<b>Simpulan</b>		Data yang disajikan pada GAP dan GBS sudah lengkap dan menggambarkan adanya Parameter Kesetaraan Gender	
<b>Komentar</b>		Data GAP yang ditampilkan sudah Relevan dengan Kegiatan serta menampilkan data secara terinci.	

### Matrik Gender Analysis Pathway (Gap)

SKPD : DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. PADANG PARIAMAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEEIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Riformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p><b>Program :</b> Peningkatan Kesiapsiagaan dan pencegahan Bahaya Kebakaran</p> <p><b>Kegiatan :</b> Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran</p> <p><b>Tujuan :</b> Terwujudnya Masyarakat yang partisipatif dan tangguh bencana kebakaran</p>	<p>1. Kabupaten Padang Pariaman Terdiri dari 17 Kecamatan dengan Luas Wilayah 1.328,79 km<sup>2</sup></p> <p>2. Masih tingginya angka kejadian kebakaran di Kab. Padang Pariaman dengan 115 kejadian kebakaran.</p> <p>3. Perempuan lebih dominan di rumah</p> <p>4. Dari sebagian kasus kebakaran yang terjadi kompor meleduk menjadi salah satu penyebab fatal terjadinya kebakaran</p> <p>5. Perempuan Kurang respon dan gampang panik dalam mengatasi kebakaran</p>	<p><b>Akses</b> - Minimnya keelibatan perempuan dalam mengikuti sosialisasi dan penyuluhan</p> <p><b>Partisipasi</b> - Perempuan lebih sering beraktifitas di dapur di banding laki-laki</p> <p><b>Kontrol</b> - Lemahnya kontrol dan tingkat pengamanan penggunaan kompor Gas/Minyak di dapur rawan potensi terjadinya kebakaran.</p> <p><b>Manfaat</b> - Rendahnya pemahaman perempuan dalam penanggulangan bahaya kebakaran.</p>	<p>- Terbatasnya anggaran</p> <p>- Penyuluhan dan Pencegahan bahaya kebakaran belum responsif gender</p>	<p>- Perempuan lebih cenderung panic jika terjadi kebakaran</p> <p>- Kurangnya pengetahuan tentang penanganan pertama bahaya kebakaran.</p>	<p>- Berkurangnya I asus yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman</p> <p>- Masyarakat memiliki pengetahuan tindakan pertama penanggulangan kebakaran.</p>	<p>- Menyiapkan seluruh dokumen perencanaan personil, RKA dan lain-lain.</p> <p>- Melaksanakan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran</p>	<p>Saat ini jumlah kasus bahaya ketakarar akibat aktifitas di dapur masih tinggi</p> <p>Tahun 2018 : 115 Kejadian Kebakaran</p>	<p><b>Kegiatan 1</b> Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran</p> <p><b>Input :</b> Rp. 50.000.000</p> <p><b>Output :</b> Terfaksananya Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran</p> <p><b>Outcome :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbentuknya kelompok penanggulangan pencegahan bahaya kebakaran di Kecamatan</li> <li>- Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tert adap bahaya kebakaran dan cara penanggulangnya.</li> <li>- Menurunnya kasus kebakaran di Kabuapter Padang Pariaman.</li> </ul>

**KERTAS KERJA PENGAWASAN (KKP)**

<b>SKPD</b>	Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman	<b>No. Indek KKP</b>	<b>( 1 )</b>
		Disusun oleh/Tanggal	<b>( 2 )</b>
		Direvisi oleh/Tanggal	<b>( 3 )</b>
		Disetujui oleh/Tanggal	<b>( 4 )</b>
<b>Nama SKPD</b>	Sekretariat Daerah		
<b>Hasil Pengawasan</b>			
<b>a</b>	<p><b>Ketersediaan Lembar GBS</b>                  Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sudah melampirkan Data Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja dan Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor</p>		
<b>b</b>	<p><b>Kualitas GBS</b>                  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja dan Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor merupakan Program Prioritas yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan menunjang pada Program Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman. Adapun tujuan dari kegiatannya agar terlaksananya Pengelolaan Gaji di Sekretariat Daerah dan Kecamatan . Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja dan Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor sudah mencoba untuk menerapkan PPRG, dibuktikan dengan tujuan kegiatan diatas.</p> <p>Data Pembuka Wawasan yang disajikan masih kurang lengkap dimana tidak terdapat Jumlah kelompok masyarakat yang beresiko serta tidak ditampilkan sesuai dengan jenis kelamin, kelompok usia dan tempat tinggal, seharusnya data ini disajikan lengkap untuk memudahkan pemetaan Resiko dan penanggulangannya serta untuk pembinaan dalam PUG.</p> <p>Faktor Kesenjangan yang ditampilkan pada Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sudah selaras dan telah menggambarkan parameter kesetaraan gender. Kebijakan yang mewajibkan dan mengatur pelaksanaan PUG dan kebijakan yang mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan sektor telah ditampilkan pada GAP dan GBS.</p> <p>Sebab kesenjangan internal menurut Tim Reviu adalah masih belum menggambarkan kesenjangan yang berasal dari internal pelaksana program, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman petugas dan pimpinan Sekretariat Daerah tentang hal-hal yang harus dijelaskan pada langkah 3 (faktor kesenjangan) pada GAP dan GBS, sehingga faktor kesenjangan dan sebab kesenjangan internal kurang tepat.</p> <p>Kesenjangan eksternal masih kurang relevan dan belum menggambarkan kesenjangan gender yang datang dari lingkungan eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program diharapkan masukan unsur pembuat kebijakan dan OPD terkait untuk mendukung pengarusutamaan gender tersebut melalui kebijakan yang dikeluarkan.</p> <p>Reformulasi tujuan sudah relevan dengan tujuan dan rencana aksi sudah relevan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan namun belum mengidentifikasi kesetaraan gender</p> <p>Basis data belum selaras dengan data pembuka dan belum mengidentifikasi kesetaraan gender</p> <p>Indikator kinerja output dan outcome sudah SMART dan telah mengatasi kesenjangan gender</p>		
<b>c</b>	<p><b>Pelaksanaan GBS</b>                  Indikator Kinerja output dan outcome yang ditetapkan sudah SMART serta telah mengatasi kesenjangan gender baik internal maupun external</p>		
<b>Simpulan</b>			
Data yang disajikan pada GAP dan GBS masih belum lengkap dan menggambarkan adanya Parameter Kesetaraan Gender			
<b>Komentar</b>			
Data GAP yang ditampilkan belum relevan dengan Kegiatan serta menampilkan data secara terinci sesuai dengan data pembuka wawasan.			

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p>Program : Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor</p> <p>Kegiatan: pengadaan peralatan kerja</p> <p>Kegiatan: Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</p> <p>Manfaat : terlaksananya pengelolaan Gaji di Sekretariat Daerah Kecamatan</p>	<p><b>Data Umum</b></p> <p>1. Bendahara gaji Sekretariat Daerah adalah salah satu bendahara gaji yang mengelolah gaji dalam jumlah sangat besar dibandingkan beberapa SKPD lain. Hal ini terjadi karena Bendahara Gaji Sekretariat Daerah harus mengelolah gaji 10 Bagian di Sekretariat Daerah ditambah gaji seluruh ASN di Kecamatan. Total saat ini ada 17 Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman dengan total 305 ASN. Saat ini terjadi kekurangan sarana dan prasarana, serta ruangan kerja yang tidak representative yaitu hanya 2x2 meter, sehingga memperlama waktu tunggu dan mengurangi kenyamanan.</p> <p>2. Bendahara gaji juga tidak memiliki Printer yang bisa untuk memotokopi berkas-berkas ASN yang akan mengalami perubahan gaji, baik KGB, Kenaikan pangkat, pengurusan gaji</p>	<p><b>Akses</b></p> <p>1. Keterbatasan tempat untuk perluasan ruangan</p> <p><b>Kontrol</b></p> <p>1. Tidak adanya kotak saran terhadap pelayanan gaji</p>	<p>1. Hal ini belum dipandang sebagai permasalahan akan pelayanan pengelolaan gaji karena beranggapan bahwa sasaran pengelolaan gaji yang baik adalah masuknya gaji tiap tanggal 1 setiap bulannya</p> <p>2. adanya anggapan protokopi kekurangan berkas pengelolaan gaji dapat dilakukan dengan menggunakan printer rekan kerja.</p>	<p>1. Rendahnya kualitas pelayanan publik di Pemerintah Daerah seolah menjadi hal yang biasa karena biasanya asal urusan selesai dan tidak ada pungutan liar, maka masih bisa dianggap hal yang wajar</p>	<p>1. Meningkatkan kenyamanan Pelayanan Pengelolaan gaji Sekretariat Daerah dan Kecamatan</p>	<p>1. Melakukan koordinasi ke Bagian Umum dan Perlengkapan terkait pengadaan printer, kursi tunggu dan perbaikan ruangan kerja bendahara gaji</p> <p>2. Membuat kotak saran pelayanan gaji</p>	<p>1. Tersedianya pelayanan yang maksimal terhadap 305 ASN yang bergaji di Setda dengan total anggaran yang diperlukan Rp.9.715.000</p>	<p><b>Kegiatan 1</b> <b>Pengadaan Peralatan Kerja</b></p> <p>Input :Rp.2.215.000</p> <p>Output :Tersedianya 1 Epson Printer M200</p> <p><b>Outcome</b> <b>:Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Gaji</b></p> <p>Input :Rp.2.500.000</p> <p>Output :Tersedianya 1 kursi tunggu dengan daya tampung 4 orang</p> <p><b>Outcome :</b> <b>Kenyamanan ASN meningkat terhadap pelayanan gaji</b></p>

**KERTAS KERJA PENGAWASAN (KKP)**

SKPD	Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman	No. Indek KKP	( 1 )
		Disusun oleh/Tanggal	( 2 )
		Direvisi oleh/Tanggal	( 3 )
		Disetujui oleh/Tanggal	( 4 )
<b>Nama SKPD</b>	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
<b>Hasil Pengawasan</b>			
<b>a</b>	<p><b>Ketersediaan Lembar GBS</b> Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman sudah melampirkan Data Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan di implementasikan pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</p>		
<b>b</b>	<p><b>Kualitas GBS</b> Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bukan merupakan Program Prioritas Kabupaten Padang Pariaman, program ini merupakan Program Rutin OPD yang termuat dalam Dokumen Perencanaan RPJMD dan RKPD</p> <p>Langkah 1 Program dan Kegiatan sudah disajikan dalam Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) tetapi Tujuan dari Kebijakan Program dan Kegiatan tidak ada disajikan</p> <p>Langkah 2 Data Pembuka Wawasan telah menggambarkan Analisa Situasi tentang pentingnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Sudah menyajikan data Terpilah secara rinci</p> <p>Langkah 3 Faktor kesenjangan sudah relevan dengan Analisa situasi pada data pembuka wawasan yang mana Faktor kesenjangan yang disajikan adalah : 1). Akses, Ketersediaan dan Kondisi ruangan rapat, ruang kerja kantor belum mampu memberikan kenyamanan bagi ASN Bapelitbangda dan pihak luar yang datang ke kantor, Ketersediaan jumlah sarana dan prasarana pendukung tempat beribadah, tempat berwudhu, toilet yang belum memadai dan belum terpilah khusus Gender 2). Partisipasi, Kapasitas Toilet, Tempat Beribadah, Kondisi suhu ruangan belum mengakomodir, masih banyak yang komplain 3). Kontrol , Gedung dan sarana yang tersedia belum memenuhi standar yang responsif gender 4). Manfaat, Peningkatan Kenyamanan ASN dan tamu yang datang</p> <p>Langkah 4 Sebab kesenjangan Internal karena :1. Keterbatasan Anggaran penyediaan sarana dan Prasarana 2. Pembangunan Gedung belum memikirkan tingkat kebutuhan sarana dan prasarana yang responsif Gender 3. Aparatur yang belum memahami Prioritas Pengarustamaan Gender. Kesenjangan Internal ini telah relevan dengan GAP dan menyangkut akses, partisipasi, kontrol dan manfaat sehingga menjadi dasar adanya kesenjangan internal.</p> <p>Langkah 5 Faktor kesenjangan Gender yang datang dari Eksternal sudah relevan dan ada keterkaitan dengan tujuan kegiatan serta Program Pelaksanaan GBS ini. Faktor kesenjangan Eksternalnya adalah : 1. Jumlah Tamu yang datang untuk rapat lebih dari 50 orang, dengan jangka waktu minimal 3 jam memerlukan kondisi kantor yang nyaman</p> <p>Langkah 6 dan 7 Reformulasi tujuan dan Rencana Aksi sudah relevan dengan Kegiatan karena sudah merujuk pada tujuan yang responsif Gender untuk mengatasi kesenjangan dan penyebabnya yang ada di langkah 3,4 dan 5</p> <p>Langkah 8 Basis Data yang ditampilkan sudah relevan dengan data pembuka wawasan</p> <p>Indikator kinerja yang ditampilkan sudah relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan sudah menampilkan Output dan Out come yang dapat diukur</p>		
<b>c</b>	<p><b>Pelaksanaan GBS</b> Indikator Ouput dan Out come sudah bisa dicapai melihat dari : Target sudah sesuai dengan Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Program dan Kegiatan Pencapaian target sudah didukung dengan penyediaan dana atau input sebesar RP. 330.000.000</p>		
<b>Simpulan</b>			
Pelaksanaan GAP dan GBS pada Bapelitbangda sudah baik yang dibuktikan dengan GAP yang sudah Relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan.			
<b>Komentar</b>			
Data yang disajikan dalam GAP dan GBS ini sudah Relevan maka dapat direkomendasikan penyajian data GAP dan GBS sudah baik			

**KERTAS KERJA PENGAWASAN (KKP)**

No	Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman	No. Indek KKP	( 1 )
		Disusun oleh/Tanggal	( 2 )
		Direvisi oleh/Tanggal	( 3 )
		Disetujui oleh/Tanggal	( 4 )

**Nama SKPD**      **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

**Hasil Pengawasan**

- a      Ketersediaan Lembar GBS**  
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman sudah melampirkan Data Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) Pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan di implementasikan pada Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Penyusunan rancangan RKPD
  
- b      Kualitas GBS**  
Langkah 1 Program dan Kegiatan sudah disajikan dalam Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) tetapi Tujuan dari Kebijakan Program dan Kegiatan tidak ada disajikan  
Langkah 2 Data Pembuka Wawasan belum sepenuhnya menggambarkan Analisa Situasi yang terpilah baik secara kuantitatif maupun kualitatif  
Langkah 3 Faktor kesenjangan sudah relevan yang mana Faktor kesenjangan yang disajikan adalah : 1). Akses, Undangan Musrenbang tidak terjangkau semua komponen masyarakat, Jadwal pelaksanaan musrenbang yang menyesuaikan dengan jadwal kepala Daerah, Informasi pelaksanaan musrenbang yang minim 2). Partisipasi, Materi yang disajikan dan cara penyampaian materi belum Komunikatif untuk seluruh komponen yang diundang 3). Kontrol , Musrenbang masih sebatas memenuhi amanat dalam penyusunan Dokumen Perencanaan, Porsi alokasi penganggaran Daerah masih lebih banyak ditentukan oleh pendekatan top down dan politik 4). Manfaat, Peningkatan Optimalisasi usulan masyarakat khususnya terkait isu Gender  
  
Langkah 4 Sebab kesenjangan Internal karena :1. Keterbatasan Anggaran penyediaan sarana dan Prasarana 2. Pembangunan Gedung belum memikirkan tingkat kebutuhan sarana dan prasarana yang responsif Gender 3. Aparatur yang belum memahami Prioritas Pengarustamaan Gender. Kesenjangan Internal ini telah relevan dengan GAP dan menyangkut akses, partisipasi, kontrol dan manfaat sehingga menjadi dasar adanya kesenjangan internal.  
  
Langkah 5 Faktor kesenjangan Gender yang datang dari Eksternal belum relevan karena salah satu dari kesenjangan yang disajikan tidak ada keterkaitan dengan pelaksanaa Program. Faktor kesenjangan Eksternalnya adalah : 1. Banyaknya Lembaga lembaga masyarakat khususnya perempuan dan anak yang belum terdaftar dikesbangpol 2. Usulan Responsif Gender dari stake holder terkait masih rendah  
Langkah 6 dan 7 Reformulasi tujuan dan Rencana Aksi sudah relevan dengan Kegiatan karena sudah merujuk pada tujuan yang responsif Gender untuk mengatasi kesenjangan dan penyebabnya yang ada di langkah 3,4 dan 5  
  
Langkah 8 Basis Data yang ditampilkan sudah relevan dengan data pembuka wawasan  
Indikator kinerja yang ditampilkan sudah relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan sudah menampilkan Output dan Out come yang dapat diukur
  
- c      Pelaksanaan GBS**  
Indikator Ouput dan Out come sudah bisa dicapai melihat dari :  
Target sudah sesuai dengan Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Program dan Kegiatan  
Pencapaian target sudah didukung dengan penyediaan dana atau input sebesar RP. 512.170.000

**Simpulan**  
Pelaksanaan GAP dan GBS pada Bapelitbangda sudah baik yang dibuktikan dengan GAP yang sudah Relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan.

**Komentar**  
Data yang disajikan dalam GAP dan GBS ini sudah Relevan maka dapat direkomendasikan penyajian data GAP dan GBS sudah baik

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

PERANGKAT DAERAH : BAPELITBANGDA

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan Dan Kebijakan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data	Indikator Kinerja
<p>Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan peralatan gedung kantor</li> <li>2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Aparatur Bapelitbangda : 35 orang yang terdiri dari : 15 orang laki-laki dan 20 orang perempuan</li> <li>2. Tingkat frekuensi rapat-rapat yang dilaksanakan setiap bulannya di Bapelitbangda rata-rata : 10 kali perbulan dengan rata-rata peserta rapat sebanyak 50 orang</li> <li>3. Sarana dan Prasarana gedung perkantoran turut menciptakan kenyamanan dan beraktifitas untuk ASN dan tamu yang datang</li> <li>4. Gedung perkantoran meliputi ruangan kerja, ruangan rapat, lobby, aula, ruang ibadah, tempat wudhu, toilet, WC, tempat parkir, dll</li> <li>5. Kondisi Sarana prasarana pendukung rapat yang belum memadai, AC, tempat ibadah, tempat wuduk, toilet belum sepenuhnya sudah terpilah dan responsif gender</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akses : ketersediaan dan Kondisi ruangan rapat, ruang kerja kantor belum mampu memberikan kenyamanan bagi ASN Bapelitbangda dan pihak luar yang datang ke kantor</li> <li>2. Ketersediaan jumlah dan sarana prasarana pendukung (tempat beribadah, tempat berwudhu, toilet yang belum memadai dan belum terpilah khusus gender)</li> <li>3. Partisipasi : Kapasitas toilet, tempat beribadah, kondisi suhu uangan belum mengakomodir, masih banyaknya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan anggaran Penyediaan Sarana Prasarana</li> <li>2. Pembangunan gedung belum memikirkan kebutuhan sarana dan prasarana yang responsif gender</li> <li>3. Aparatur yang belum memahami prioritas pengarusutamaan gender</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah tamu yang datang untuk rapat lebih dari 50 orang, dengan jangka waktu minimal 3 jam memerlukan kondisi kantor yang nyaman</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya ruangan yang kondusif, nyaman dan responsif gender</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan jumlah AC ruangan Rapat</li> <li>2. Pengadaan kursi di ruang rapat</li> <li>3. Pembuatan taman Bapelitbangda</li> <li>4. Penyediaan toilet yang nyaman dan terpilah serta responsif gender</li> <li>5. Penyediaan sekat tempat beribadah</li> <li>5. Penyediaan tempat berwudhu yang nyaman</li> <li>7. Penyediaan tempat/ ruang istirahat bagi pegawai/ ibu hamil dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah toilet terpilah gender : 0</li> <li>2. Jumlah AC ruangan rapat hall : 2 unit</li> <li>3. Jumlah ruangan menyusui/ istirahat wanita hamil : 0</li> <li>4. Jumlah kursi ruang rapat:</li> <li>5.</li> </ol>	<p>Kegiatan 1 : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</p> <p>Input : Rp. 228.000.000,-</p> <p>Output : Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor (AC : 2 unit, dll)</p> <p>Outcome : Persentase sarana prasana aparatur yang tersedia : 85%</p> <p>Kegiatan 2 : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</p> <p>Input :</p>

**PERANGKAT DAERAH : BAPELITBANGDA**  
**Program perencanaan pembangunan daerah**

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**

Program / Kegiatan	LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
		Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Kebijakan Dan Reformasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data	Indikator Kinerja
<p>Program perencanaan pembangunan daerah</p> <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan musrenbang RKPD</li> <li>2. Penyusunan rancangan RKPD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan 2 pendekatan. Pendekatan secara substansi (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial) dan Pendekatan secara proses (teknokratik, top down, bottom up, politis dan partisipatif)</li> <li>2. Musrenbang salah satu instrumen untuk menjawab pendekatan bottom up dan aspiratif</li> <li>3. Peserta yang dilibatkan dalam musrenbang adalah semua stakeholder, namun partisipasi gender khususnya kelompok perempuan masih rendah</li> <li>4. Materi yang dibahas masih sangat minim terkait dengan isu isu gender</li> <li>5. Komposisi peserta dari anak-anak dan pemuda tidak ada dan dari kelompok perempuan dan lansia juga masih sedikit</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akses : Undangan Musrenbang tidak menjangkau semua komponen masyarakat</li> <li>2. Jadwal pelaksanaan musrenbang yang menyesuaikan dengan jadwal kepala daerah</li> <li>3. Informasi pelaksanaan musrenbang yang minim</li> <li>4. Partisipasi : Materi yang disajikan dan cara penyampaian materi belum komunikatif untuk seluruh komponen yang diundang</li> <li>5. Kontrol : musrenbang masih sebatas memenuhi amanat dalam penyusunan dokumen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Perencanaan kegiatan yang responsif gender belum terkoordinir dengan baik</li> <li>2. Masih minimnya sosialisasi, pinformasi dan edukasi kepada komponen masyarakat terkait penyusunan perencanaan yang baik</li> <li>3. Keterbatasan anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan musrenbang</li> <li>4. Mindset perencanaan dimana semua yang diusulkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyaknya lembaga-masyarakat khususnya perempuan dan anak yang belum terdaftar di kesbangpol</li> <li>2. Usulan responsif gender dari stakeholder terkait masih rendah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya sinkronisasi program pembangunan pusat, propinsi dengan kabupaten salah satunya terkait dengan responsif gender</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggara n Musrenbang penyusunan RRPD yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dan lebih responsif gender</li> <li>2. Penyusunan rencana kerja pembangunan daerah yang mendukung isu gender dalam dokumen RRPD dan Renja OPD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komposisi peserta musrenbang yang hadir antara laki-laki dan perempuan : 60:40</li> <li>2. Tingkat kehadiran kelompok forum anak, kelompok perempuan, PKK, dll</li> <li>3. Usulan terkait peningkatan dan responsif gender yang disepakati/disetujui</li> </ol>	<p>Kegiatan 1 : Penyelenggaraan musrenbang RRPD</p> <p>Input : Rp. 151.900.000,-</p> <p>Output : Tertaksananya musrenbang RRPD tahun 2019</p> <p>Outcome : Persentase partisipasi masyarakat dalam musrenbang</p> <p>Kegiatan 2 : Penyusunan rancangan RRPD</p> <p>Input : Rp. 360.270.000,-</p>	

**KERTAS KERJA PENGAWASAN (KKP)**

SKPD	Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman	No. Indek KKP	( 1 )
		Disusun oleh/Tanggal	( 2 )
		Direvisi oleh/Tanggal	( 3 )
		Disetujui oleh/Tanggal	( 4 )
<b>Nama SKPD</b>	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga		
<b>Hasil Pengawasan</b>	<p><b>a</b>      <b>Ketersediaan Lembar GBS</b>  Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Sudah Melampirkan Data Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) Pada Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan di implementasikan pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana</p> <p><b>b</b>      <b>Kualitas GBS</b>  Program Pengembangan Destinasi Wisata merupakan Program Prioritas Kabupaten Padang Pariaman untuk Pengembangan Daerah Wisata yang ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, banyak objek wisata di Padang Pariaman yang belum tertata dengan baik, terutama masalah sarana dan Prasarananya. ini dapat di lihat dari tujuan yang ada dalam Gender Analysis Pathway (GAP) yaitu pembangunan Sarana dan Prasarana bagi wisatawan di objek wisata. di lihat dari Tujuan Kegiatan ini sudah mencoba untuk menerapkan PPRG</p> <p>Data Pembuka wawasan pada langkah 2 yang disampaikan dapat kita lihat bahwa belum menampilkan data jumlah wisatawan yang mengunjungi Objek wisata yang ada di Padang Pariaman baik wisatawan Lokal maupun internasional ataupun jumlah wisatawan laki - laki maupun perempuan, sehingga dengan data tersebut kita bisa memetakan yang benar -benar perlu untuk dibina dalam Pengarus Utamaan Gender</p> <p>Langkah 3 belum menampilkan dan menerapkan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Akan gender. Faktor kesenjangan yang mencakup 4 faktor yaitu : Akses,partisipasi,Kontrol dan manfaat belum relevan dengan kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana karena Faktor Kesenjangan yang ditampilkan hanya tentang kurangnya informasi tentang Objek wisata</p> <p>Langkah 4 Keterbatasan data, kunjungan wisatawan berdasarkan usia dan jenis kelamin sudah menampilkan sebab kesenjangan gender yang datang dari Internal Pelaksana Program</p> <p>Langkah 5 yang menampilkan kesenjangan eksternal masih kurang relevan dan belum menggambarkan kesenjangan Gender yang datang dari Eksternal karena tidak adanya berapa jumlah data Masyarakat yang kurang meminati pengembangan Objek wisata</p> <p>Langkah 6 dan 7 Reformulasi tujuan sudah mulai relevan dan Rencana Aksi sudah Relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengembangkan pembangunan Sarana dan Prasarana bagi wisatawan di objek wisata</p> <p>Langkah 8 yang menampilkan Basis Data yang disadur dari Data Pembuka Wawasan sudah Relevan</p> <p>Langkah 9 yang menampilkan indikator kinerja tidak ada di sajikan</p> <p><b>c</b>      <b>Pelaksanaan GBS</b>  Indikator Ouput sudah bisa dicapai melihat dari :  Target sudah sesuai dengan Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Program dan Kegiatan  Pencapaian target sudah didukung dengan penyediaan dana atau input sebesar RP. 262,190,000,-</p>		
<b>Simpulan</b>	Dapat disimpulkan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Kualitas dan Pelaksanaan GBS belum baik karena masih banyak langkah langkah yang tidak relevan/tidak sesuai dengan Isu Gender.		
<b>Komentar</b>	Data GAP yang ditampilkan belum relevan dengan kegiatan yang ditampilkan		

**KERTAS KERJA PENGAWASAN (KKP)**

Inspektorat Kab Padang Pariaman	No. Indek KKP	( 1 )
	Disusun oleh/Tanggal	( 2 )
	Direvisi oleh/Tanggal	( 3 )
	Disetujui oleh/Tanggal	( 4 )

**Nama SKPD** Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

**Hasil Pengawasan**

**a** Ketersediaan Lembar GBS  
 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Sudah Melampirkan Data Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) Pada Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga dan di Implementasikan pada kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

**b** Kualitas GBS  
 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga merupakan program Prioritas Pada bidang keolahragaan ini dapat dilihat tujuan Program tersebut yaitu Mengembangkan dab meningkatkan kualitas atlet pada kejuaraan PORDIDA

Data pembuka wawasan /Data terpilah yang ditampilkan masih kurang lengkap karena belum sepenuhnya menyajikan isu gender yang terjadi pada Kompetisi Olahraga beladiri antar pelajar di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, dimana data yang disajikan masih berupa pemilahan jenis kelamin belum ada yang tentang pemilahan jenis usia

Langkah 3 belum menggambarkan kesenjangan yang terjadi dilihat dari 4 komponen yang ada :

- 1.Akses: Faktor Kesenjangan akses yang ditampilkan belum relevan
- 2.Partisipasi belum disajikan secara relevan
- 3.Kontrol : Faktor kesenjangan kontrol tidak ada disajikan
- 4.Manfaat : Faktor Kesenjangan Manfaat belum relevan

Langkah 4 dan langkah 5 yang menyajikan Kesenjangan internal dan eksternal belum relevan dengan Kegiatan

Langkah 6 reformulasi tujuan sudah relevan karena reformulasi tujuan mengembangkan dan meningkatkan kualitas atlet pada kejuaraan PORDIDA sudah menjawab sebab kesenjangan yang diidentifikasi di langkah 3,4 dan 5

Langkah 7 Rencana Aksi yang ditetapkan dalam Gender Analysis Pathway (GAP) Belum merespon gender untuk mengatasi kesenjangan dan penyebabnya yang ada di langkah 3,4 dan 5

Basis Data belum relevan karena belum mengidentifikasi kesetaraan Gender

Indikator Kinerja belum Relevan Kerana tidak ada keterkaitan yang signifikan antara analisa situasi ,rencana aksi dan indikator kinerja yang ditampilkan

**c** **Pelaksanaan GBS**  
 Indikator Ouput belum bisa dicapai melihat dari :

Target belum sesuai dengan Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Program dan Kegiatan

Pencapaian target belum disajikan

sasaran kegiatan belum relevan dengan isu gender dilihat pada data pembuka wawasan yang ada pada GAP

**Simpulan**

Data yang disajikan dalam GAP dan GBS Belum Relevan dengan kegiatan Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga

Isu Gender tidak teridentifikasi secara jelas dalam Data pembuka wawasan yang disajikan

Kurang adanya keterkaitan Logis analisa situasi,Rencana Aksi dan Indikator kinerja pada GAP

**Komentar**

Dikarenakan Data yang disajikan dalam GAP dan GBS Belum Relevan maka direkomendasikan untuk melakukan perbaikan dalam penyajian data GAP dan GBS

**KERTAS KERJA PENGAWASAN (KKP)**

Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman	No. Indek KKP	( 1 )
	Disusun oleh/Tanggal	( 2 )
	Direvisi oleh/Tanggal	( 3 )
	Disetujui oleh/Tanggal	( 4 )
<b>Nama SKPD</b>	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
<b>Hasil Pengawasan</b>		
<b>a</b>	<p><b>Ketersediaan Lembar GBS</b> Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Sudah Melampirkan Data Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Badget Statement (GBS) Pada Program Pengembangan Kemitraan dan di implementasikan pada Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata</p>	
<b>b</b>	<p><b>Kualitas GBS</b> Program Pengembangan Kemitraan juga merupakan Program Prioritas Kabupaten Padang Pariaman untuk Pengembangan Daerah Wisata yang ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman dalam hal pengembangan kemitraan, tujuan dari kegiatan ini meningkatkan keterampilan pelaku ekonomi kreatif belum relevan dengan Kegiatan ini yaitu Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata</p> <p>Data Pembuka wawasan pada langkah 2 yang disampaikan sudah menampilkan jumlah data pelaku ekonomi kreatif yang sudah terpilah antara Laki - laki dan perempuan, namun data yang disajikan tidak sinkron dengan Kejadiannya</p> <p>Langkah 3 belum menampilkan dan menerapkan Perencanaan Penganggaran yang Responsif terhadap isu Gender, ini dapat dilihat dari 4 Faktor Kesenjangan yang disajikan yaitu Akses : Keterbatasannya informasi dan pelatihan, ada syarat. Partisipasi : Tidak adanya ide dan usaha menciptakan usaha baru dan kurangnya kreatifitas. Manfaat : Tidak ada modal, Kurangnya informasi untuk pemasaran</p> <p>Langkah 4 Keterbatasan dana, keterbatasan data dan keterbatasan wewenang belum menggambarkan sebab kesenjangan internal yang terkait dengan Isu Gender</p> <p>Langkah 5 yang menampilkan kesenjangan eksternal masih kurang relevan dan belum menggambarkan kesenjangan Gender yang datang dari Eksternal karena tidak adanya berapa jumlah data Masyarakat yang kurang meminati pengembangan Objek wisata</p> <p>Langkah 6 dan 7 Reformulasi tujuan dan Rencana Aksi tidak relevan dengan Kegiatan karena tidak merujuk pada tujuan yang responsif Gender untuk mengatasi kesenjangan dan penyebabnya yang ada di langkah 3,4 dan 5</p> <p>Langkah 8 menampilkan Basis Data yang masih kurang lengkap karena tidak menampilkan jumlah pelaku ekonomi kreatif secara rinci</p> <p>Langkah 9 indikator kinerja yang di sajikan masih berupa out put yang tidak relevan untuk mengatasi kesenjangan Gender</p>	
<b>c</b>	<p><b>Pelaksanaan GBS</b> Indikator Out put belum menggambarkan Pelaksanaan GBS secara maksimal karena dapat dilihat dari alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 17.900.000,-, indikator out put juga tidak relevan karena belum mengatasi kesenjangan Gender</p>	
<b>Simpulan</b>		
Isu gender tidak teridentifikasi secara Jelas yang berakibat rencana aksi tidak jelas tujuannya karena data terpilah belum dapat membuktikan Perencanaan yang responsif gender		
<b>Komentar</b>		
Dikarenakan Data yang disajikan dalam GAP dan GBS Belum Relevan maka direkomendasikan untuk melakukan perbaikan dalam penyajian data GAP dan GBS		

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

PROGRAM

: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga  
: Pengembangan Destinasi Pariwisata

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis data (Base Line)	Indikator Kerja
Program : Pengembangan Destinasi Pariwisata  Kegiatan: Peningkatan pembangunan sarana & Parasarana  Tujuan: pembangunan sarana Prasarana bagi wisatawan di Objek Wisata	Jumlah Objek Wisata yang sesuai standar: - Objek Wisata Pantai Tiram - Pemandian Rumah Putih Lubuak Bonta - Air Terjun Nyarai	Akses: Kurangnya informasi tentang Objek Wisata  partisipasi:  manfaat: Anggaran dana terbatas	- Keterbatasan data, kunjungan wisatawan Berdasarkan usia dan jenis kelamin	Kurangnya minat Masyarakat untuk Pengembangan Objek Wisata	Pembangunan sarana Parasarana bagi wisatawan di Objek wisata	- Pembangunan Toilet umum di OW Pasia Katapleng - Pembangunan Jalan Pedestrian Pantai ARTHA - Pembuatan Objek Wisata Baru - Lanjutan Pembangunan Jenjang seribu OW Bukik Siriah - Pengembangan Perlengkapan Saprasi di OW - Renovasi Gazebo Batas Kota Padang Panjang	- Objek Wisata Pantai Tiram - Pemandian Rumah Putih Lubuak Bonta - Air Terjun Nyarai	

KEPALA DINAS PARIWISATA  
PEMUDA DAN OLARAHAGA,



**JON KENEDI, S.Sos.MM**  
NIP. 19690525 198903 1 007

Parit Malintang, 19 Maret 2018  
KEPALA BIDANG PARIWISATA,



**WIWIEK HERAWATI, S.ST.MM**  
NIP. 19741229 200902 2 002

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga  
: Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga

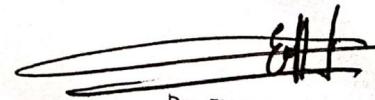
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p>Program : Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga</p> <p>Kegiatan : Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga</p> <p>Tujuan : Mengembangkan dan meningkatkan kualitas atlet pada kejuaraan PORDIDA</p>	<p>- Kompetisi Olahraga Beladiri antar pelajar</p> <p>- Data atlet : putra 4; putri 4;</p> <p>- Tujuan : Mengembangkan keterampilan dan kualitas olahraga beladiri bagi para atlet</p>	<p>Akses :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan Informasi dan Pelatihan</li> <li>- Ada syarat</li> </ul> <p>Partisipasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beban dari kegiatan akademis para atlet di sekolah masing-masing</li> </ul> <p>Kontrol :</p> <p>Manfaat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya Sumber daya Atlet</li> <li>- Kurangnya Sumber daya pelatih</li> <li>- Kurangnya Sosialisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan Dana</li> <li>- Keterbatasan Data Wewenang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber Daya Manusia</li> <li>- Teknologi</li> <li>- Informasi</li> </ul>	<p>Reformulasi Tujuan</p> <p>Mengembangkan dan meningkatkan kualitas atlet pada kejuaraan PORDIDA</p>	<p>Rencana Aksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi</li> <li>- Rapat</li> <li>- Seleksi</li> <li>- Pelatihan</li> <li>- Pendaftaran</li> <li>- Kompetisi</li> </ul>	<p>Basis Data (Base-Line)</p> <p>Jumlah Peserta yang ikut</p>	<p>Indikator Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki Legalitas</li> <li>- Mendapatkan Bantuan</li> <li>- Munculnya atlet-atlet baru yang berkualitas</li> </ul>

KEPALA  
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLARHAGA



JON KENEDI, S.Sos,MM  
NIP. 19690525 198903 1 007

KEPALA BIDANG OLARHAGA



Drs. ELMI UNTUNG  
19650617 200801 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

DPO Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga  
Program Pengembangan Kemitraan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebutakan/ Program/Regulator	Data Pembuka Wilayah	SU GENDER			KEBUAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program Pengembangan Kemitraan  Kegiatan Pembinaan koordinasi pembangunan kemitraan perwisata  Tujuan Meningkatkan keterampilan pelaku Ekonomi Kreatif	- Data Pelaku Ekonomi Kreatif, laki-laki + 10, Perempuan + 20 - Tujuan pengembangan wilayah Pelaku Ekonomi Kreatif	Akses - Keterbatasannya informasi dan Pelatihan - Ada Swarat  Partisipasi - Tidak adanya ide dan usaha mendapatkan usaha baru - Kurangnya kreatifitas  Kontrol  Manfaat - Tidak ada modal Rumahnya informasi untuk pemaksimalan	- Keterbatasan Dana - Keterbatasan Data - Keterbatasan Wewenang	- Pemasaran - Packing - Sumber Daya Manusia - Manajemen Keuangan yang kurang paham - Keterbatasan Mengikuti Kemajuan Teknologi Informasi	- Meningkatkan keterampilan pada masyarakat pelaku Ekonomi Kreatif - Kemampuan Mengelola Keuangan - Memperluas Mitra Kerja	- Pendataan Promosi reschedule Sosialisasi Rapat Koordinasi Pelatihan Monitoring Pelatihan Workshop - Studi Banding	- Jumlah Pelaku Ekraf yang terdata Perkecamatan - Jumlah Pelaku Ekraf yang sudah memiliki legalitas (BPOM, Sertifikat Halal, Sertifikat Layak Sehat, SNI Dll - Jumlah Pelaku Usaha Ekraf yang sudah memiliki HKI	- Memiliki Legalitas Mendapatkan Bantuan - Bermunculnya Usaha Baru yang berbasis kepada Ekonomi Kreatif

KEPALA BIDANG PROMOSI DAN EKRAF

*Kemal Bahren Pasha*  
KEMAL BAHREN PASHA, SE- AK  
NIP. 19771120 200804 1 004

**KERTAS KERJA PENGAWASAN (KKP)**

SKPD	Inspektorat Kota Padang	No. Indek KKP	( 1 )
		Disusun oleh/Tanggal	( 2 )
		Direvisi oleh/Tanggal	( 3 )
		Disetujui oleh/Tanggal	( 4 )
<b>Nama SKPD</b>		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman	
<b>Hasil Pengawasan</b>			
<b>a</b>	<b>Ketersediaan Lembar GBS</b> Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sudah Melampirkan Data Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) Pada Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		
<b>b</b>	<b>Kualitas GBS</b> Program Pengembangan budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan yang ada pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Menunjang Pada Program Pembangunan daerah Kota Padang secara Umumnya  Dilihat dari tujuan kegiatan :  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Minat Budaya Baca Masyarakat</li> <li>2. Sampainya Bahan Bacaan untuk Masyarakat yang Daerahnya jauh dari Perpustakaan</li> </ol> <p>Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca sudah mencoba untuk menerapkan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Akan gender di buktikan dengan 2 (dua) tujuan diatas yan yang memberikan Peningkatan wawasan.</p> <p>Data Pembuka wawasan yang disampaikan dapat kita lihat bahwa sudah menampilkan data dari jumlah perpustakaan yang ada di Nagari namun belum mennyajikan data yang terpilah , dimana data dapat kita lihat pada langkah 2 yang ada pada Matrik GAP, dengan demikian data jumlah penduduk belum menampilkan data secara Mikro dimana data Penduduk yang mempunyai minat baca Perjenis kelamin padaKabupaten Padang Pariaman belum ditampilkan.</p> <p>Faktor kesejangan yang ditampilkan mencakup 4 faktor yaitu akses, Partisipasi, kontrol dan manfaat pada program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan sudah selaras dan telah menggambarkan isu gender namun pada faktor kontrol harus memasukan peranan Pemerintah</p> <p>Langkah 4 yang menampilkan sebab kesenjangan Internal perlunya pengadaan sarana dan prasarana serta peningkatan SDM sehingga tidak menghambat OPD yang akan melaksanakan kegiatan</p> <p>Langkah 5 yang menampilkan kesenjangan eksternal sudah mulai relevan namun diharapkan masukan unsur pembuat kebijakan dan Dinas terkait yang sudah atau belum mendukung Pengarustamaan Gender tersebut secara kebijakan</p> <p>Langkah 6 dan 7 Reformulasi tujuan sudah mulai relevan namun masih perlu perbaikan dan Rencana Aksi sudah Relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan sumberdaya</p> <p>Langkah 8 yang menampilkan Basis Data yang disadur dari Data Pembuka Wawasan sudah Relevan namun belum menampilkan data secara mikro atau data per Nagari yang menjadi Pokok Kegiatan</p> <p>Langkah 9 yang menampilkan indikator kinerja sudah relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menampilkan Input,output dan Hasil dari Kegiatan Tersebut</p>		
<b>c</b>	<b>Pelaksanaan GBS</b> Indikator Ouput sudah bisa dicapai melihat dari : Target sudah sesuai dengan Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Program dan Kegiatan Pencapaian target sudah didukung dengan penyediaan dana atau input sebesar RP. 330,000,000,- sasaran kegiatan sudah sesuai dengan isu gender dilihat pada data pembuka wawasan yang ada pada GAP		
<b>Simpulan</b>			
		Dapat disimpulkan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Kualitas dan Pelaksanaan GBS sudah baik dibuktikan dengan GAP yang sudah Relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan.	
<b>Komentar</b>			
		Data GAP yang ditampilkan sudah Relevan dengan Kegiatan,namun belum menampilkan data secara terinci dimana data pada pembuka wawasan belum terinci tapi agar lebih baiknya data Gender Analisis Pathway (GAP) yang ditampilkan diharapkan untuk menyajikan data terpilah per nagari sesuai dengan Kegiatan Penyelenggaraan koordinasi Pengembangan Budaya Baca.	

# MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Padang Pariaman  
 BAGIAN : Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<b>Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan</b>	<b>Data Pembuka Wawasan</b>	<b>ISU GENDER</b>		<b>Sebab Kesenjangan Eksternal</b>	<b>Reformulasi Tujuan</b>	<b>Rencana Aksi</b>	<b>Basis Data (Base-Line)</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
<b>Program :</b> Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	<b>Data Umum</b> - Luasnya Kabupaten Padang Pariaman yaitu 1.328,79 km <sup>2</sup> - Jumlah Perpustakaan yang ada di Nagari dan Sekolah-Sekolah di Kab. Padang Pariaman - Jumlah SDM pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	<b>Akses</b> - Luasnya cakupan wilayah Kabupaten Padang Pariaman - Kenderaan Perpustakaan keliling di Kabupaten Padang Pariaman masih sedikit yaitu 2 unit - Kurangnya dana yang didapat untuk melaksanakan programnya secara rutin	<b>Sebab Kesenjangan Internal</b> - Kurangnya jumlah SDM yang akan menjalankan program Perpustakaan keliling - Belum memiliki kemampuan dalam penataan dan pengelolaan Taman Baca Masyarakat - Belum adanya tenaga IT yang mampu mengelola Perpustakaan - Belum jelasnya tupoksi pengelolaan Perpustakaan yang ada di Nagari dan sekolah-sekolah	<b>Sebab Kesenjangan Eksternal</b> - Kepedulian nagari terhadap pentingnya budaya baca pada masyarakat - Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan perpustakaan	<b>Reformulasi Tujuan</b> - Masyarakat mendapatkan bahan bacaan yang selama ini sulit untuk mereka dapatkan - Tersedianya Perpustakaan nagari yang memadai	<b>Rencana Aksi</b> - Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca - Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah - Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perpustakaan	<b>Basis Data (Base-Line)</b> - Perpustakaan Nagari 103 - Perpustakaan SD 404 - Perpustakaan SMP 60 - Perpustakaan Daerah 1	<b>Kegiatan 1</b> Input : Melakukan pembinaan terhadap pengelola perpustakaan Output : Meningkatnya jumlah minat baca pada masyarakat
<b>Tujuan :</b> - Meningkatkan Minat Budaya Baca Masyarakat - Sampainya Bahan Bacaan Untuk Masyarakat Yang Daerahnya Jauh Dari Perpustakaan	<b>Partisipasi</b> - Belum adanya tenaga Perpustakaan yang terdidik di sekolah-sekolah - Kepedulian Pemerintah Nagari terhadap pentingnya pustaka di wilayah Nagari	<b>Kontrol</b> - Belum memiliki fasilitas pustaka yang baik di nagari-nagari - Belum lengkapnya koleksi bacaan yang ada di Nagari dan sekolah-sekolah						<b>Outcome :</b> Meningkatnya wawasan masyarakat untuk memperbaiki taraf hidupnya

**KERTAS KERJA PENGAWASAN (KKP)**

SKPD	Inspektorat Kota Padang	No. Indek KKP	( 1 )
		Disusun oleh, Tanggal	( 2 )
		Direvisi oleh, Tanggal	( 3 )
		Disebuti oleh, Tanggal	( 4 )
<b>Nama SKPD</b>	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
<b>Hasil Pengawasan</b>			
<b>a</b>	<p><b>Ketersediaan Lembar GBS</b> Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sudah Melampirkan Data Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) Pada Program Peningkatan Pangan (Pertanian dan Perkebunan) pada kegiatan Pemanfaatan Perkarangan untuk Pengembangan Pangan</p>		
<b>b</b>	<p><b>Kualitas GBS</b> Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian dan Perkebunan) pada kegiatan Pemanfaatan Perkarangan untuk pengembangan pangan</p> <p>Dilihat dari tujuan kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Termanfaatkan perkarangan pangan sebagai sumber pangan keluarga</li> <li>2. Terlaksananya lomba daya menu</li> </ol> <p>Kegiatan Peningkatan pemanfaatan perkarangan dan pengembangan pangan sudah mencoba untuk menerapkan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Akan gender di buktikan dengan dua tujuan diatas yang berupaya untuk meningkatkan Keberadaan perempuan dalam pembangunan dengan berupaya memberikan Peningkatan wawasan dan keterampilan</p> <p>Data Pembuka wawasan yang disampaikan belum menampilkan adanya Pengarus Utamaan Gender yang akan dilaksanakan pada kegiatan yang direncanakan dapat kita lihat pada keterangan data umum GBS</p> <p>Langkah 3 yang menampilkan faktor kesenjangan yang mencakup 2 faktor yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partisipasi rendahnya SDM masyarakat khususnya ibu rumah tangga / wanita yang memanfaatkan lahan perkarangan</li> <li>2. Akses usaha Pengelolaan pangan masih dianggap sebagai usaha sampingan</li> </ol> <p>Langkah 4 sebab kesenjangan internal adalah 1. Kurangnya pemahaman para pengambil kebijakan dalam mempertimbangan isu gender pada penyusunan program dan kegiatan 2. Keterbatasan anggaran 3. Kurangnya kesadaran dalam pemanfaatan perkarangan</p> <p>Langkah 5 yang menampilkan kesenjangan eksternal belum relevan namun diharapkan masukan unsur pembuat kebijakan dan Dinas terkait yang sudah atau belum mendukung Pengarusutamaan Gender tersebut secara</p> <p>Langkah 6 dan 7 Reformulasi tujuan sudah mulai relevan dan Rencana Aksi sudah Relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan sumberdaya perempuan dalam masyarakat</p> <p>Langkah 8 yang menampilkan Basis Data yang disadur dan Data Pembuka Wawasan sudah Relevan</p> <p>Langkah 9 yang menampilkan indikator kinerjanya sudah relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan</p> <p><b>Pelaksanaan GBS</b> Indikator Output sudah bisa dicapai melihat dari : Target sudah sesuai dengan Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Program dan Kegiatan Pencapaian target sudah didukung dengan pemediaan dana atau input sebesar RP. 668.375.000.-</p>		
<b>Simpulan</b>	Dapat disimpulkan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Ketersediaan GBS, Kualitas dan Pelaksanaan GBS kurang baik dibuktikan dengan GAP yang belum Relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan.		
<b>Komentar</b>	Data GAP yang ditampilkan sudah Relevan dengan Kegiatan, belum menampilkan dukungan responsif Gender sehingga direkomendasikan untuk dapat diperbaiki dan disempurnakan.		

**MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**

OPD : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
 KABUPATEN : PADANG PARIAMAN  
 TAHUN : 2019

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<b>GAP</b>								
<p><b>Program :</b> Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan)</p> <p><b>Kegiatan :</b> Pemanfaatan sumber pangan lokal untuk pengembangan pangan</p> <p><b>Tujuan :</b> - Termanfaatkannya pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. - Terlaksananya lomba cipta menu.</p>	<p><b>Data Umum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketahanan pangan terjadi apabila semua orang secara terus menerus, baik secara fisik, sosial, dan ekonomi mempunyai akses untuk pangan yang memadai/cukup, bergizi dan aman, yang memenuhi kebutuhan pangan mereka dan pilihan makanan untuk hidup secara aktif dan sehat.</li> <li>- Untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dalam mencapai kemandirian pangan maka dilakukan Kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, pengembangan sistem ketahanan pangan dan dukungan sarana/prasarana</li> </ul>	<p><b>Partisipasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya SDM masyarakat khususnya ibu rumah tangga/wanita untuk memanfaatkan lahan pekarangan</li> </ul> <p><b>Akses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya lahan pekarangan untuk dimanfaatkan.</li> <li>- Usaha pengolahan pangan masih dianggap sebagai usaha sampingan.</li> <li>- kegiatan pengolahan pangan lokal masih didominasi oleh kaum perempuan sebagai pengisi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Para pengambil keputusan/kebijakan belum sepenuhnya memahami tentang pentingnya mempertimbangkan isu gender dalam penyusunan program/kegiatan.</li> <li>- Keterbatasan anggaran dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan.</li> <li>- Masih rendahnya SDM masyarakat khususnya ibu rumah tangga untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat masih rendah.</li> <li>- Tingkat pendapatan masyarakat masih rendah.</li> <li>- Budaya pasif nirimo masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang tidak mau merubah keadaan.</li> <li>- Ketergantungan masyarakat dgn bantuan pemerintah.</li> <li>- Paradigma yang menjalankan usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menekan pengeluaran keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan.</li> <li>- Meningkatkan nilai gizi pangan keluarga dengan berbagai macam olahan pangan lokal.</li> <li>- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan sendiri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian bantuan bibit tanaman tahunan dan tanaman semusim serta bantuan saprodi lainnya.</li> <li>- Penyuluhan dan Pembinaan pada KWT pelaksana kegiatan pemanfaatan pekarangan</li> <li>- Melakukan lomba kreasi cipta menu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KWT yang memiliki lahan pekarangan yang berpotensi untuk pengembangan pangan, yakni pada 28 KWT.</li> <li>- Banyak terdapat pelaku usaha pengolahan pangan lokal dengan berbagai macam jenis usaha pengolahan pangan lokal.</li> <li>- Kelompok masyarakat/kelompok wanita tani yang akan diintervensi tahun 2019:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KWT Anugrah Kec. Batang Anal</li> <li>2. KWT Kelok Indah Kec. Lubuk Alung</li> <li>3. KWT Kalodan Prima Kec. VII Koto</li> <li>4. KWT Bahagia Kec. VII Kota</li> <li>5. KWT Bengke Sakato</li> </ol>	<p><b>Kegiatan:</b> Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan.</p> <p><b>Input:</b> Rp. 669.375.000,-</p> <p><b>Outcome:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.</li> <li>- Terpenuhinya kebutuhan pangan keluarga sehari-hari.</li> <li>- Meningkatnya kreativitas pelaku usaha pengolahan pangan lokal.</li> </ul>

**KERTAS KERJA PENGAWASAN (KKP)**

<b>SKPD</b>	Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman	<b>No. Indek KKP</b>	<b>( 1 )</b>
		Disusun oleh/Tanggal	<b>( 2 )</b>
		Direvisi oleh/Tanggal	<b>( 3 )</b>
		Disetujui oleh/Tanggal	<b>( 4 )</b>
<b>Nama SKPD</b>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
<b>Hasil Pengawasan</b>	Lisa Sefita		
<b>a</b>	<p><b>Ketersediaan Lembar GBS</b> Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman sudah melampirkan Data Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) Pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan di Implementasikan pada Kegiatan Olimpiade Sains Nasional ( OSN ) tingkat SD</p>		
<b>b</b>	<p><b>Kualitas GBS</b> Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SD bertujuan agar adanya wakil dari Padang Pariaman di tingkat Propinsi Data Pembuka Wawasan yang disampaikan sudah menggambarkan jumlah cabang yang dipertandingkan dan jumlah peserta dan jenis kelamin yang mengikuti perlombaan tersebut. Faktor kesenjangan dalam program ini adalah : a). Akses, Peserta Olimpiade Sains Nasional lebih dominan diikuti oleh perempuan dan peserta OSN tidak membedakan jenis kelamin antara siswa perempuan dan laki-laki b). Partisipasi, dalam hal ini semua siswa memiliki hal yang sama dalam mengikuti OSN  Sebab kesenjangan Internal masih ada persepsi bahwa siswa perempuan lebih rajin dibanding laki-laki sementara siswa laki-laki lebih dominan dalam menjuarai OSN dan tidak adanya sosialisasi tentang Gender di sekolah.  Kesenjangan eksternal yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dimana sekolah lebih dominan mengirim siswa perempuan dari pada laki-laki bukan merupakan kesenjangan eksternal Reformulasi tujuan meningkatkan peran siswa laki-laki dalam mengikuti OSN sudah relevan dengan tujuan dan Rencana Aksi sudah relevan dengan kegiatan Basis Data yang disadur dari Data Pembuka Wawasan sudah Relevan Indikator kinerja yang ditampilkan sudah relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menampilkan Input, Output dan Hasil dari Kegiatan Tersebut</p>		
<b>c</b>	<p><b>Pelaksanaan GBS</b> Indikator Ouput sudah bisa dicapai melihat dari : Target sudah sesuai dengan Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Program dan Kegiatan Pencapaian target sudah didukung dengan penyediaan dana atau input sebesar Rp26.100.000,00 sasaran kegiatan sudah sesuai dengan isu gender dilihat pada data pembuka wawasan yang ada pada GAP</p>		
<b>Simpulan</b>			
Dapat disimpulkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ketersediaan GBS, Kualitas dan Pelaksanaan GBS sudah baik dibuktikan dengan GAP yang sudah Relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan.			
<b>Komentar</b>			
Data GAP yang ditampilkan sudah relevan dengan kegiatan serta menampilkan data secara terinci			

### MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator
<p>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</p> <p>Kegiatan : Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat SD</p> <p>Tujuan : Adanya wakil Padang Pariaman di tingkat propinsi</p>	<p><b>Data Umum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SD = 408 unit</li> <li>- Jumlah total siswa SD = 50.837 orang.</li> <li>- cabang lomba yang diikuti adalah matematika dan IPA</li> <li>- Jumlah peserta tiap cabang = 51 orang</li> <li>- Jumlah peserta lomba matematika, L= 24 orang, P= 27 orang</li> <li>- Jumlah peserta lomba IPA, L= 23 orang, P= 28 orang</li> <li>- Peningkat 1,2 dan 3 langsung dikirim ke propinsi</li> </ul>	<p><b>Akses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peserta olimpiade Sain Nasional (OSN) tidak membedakan siswa perempuan dan laki-laki</li> <li>- Peserta OSN lebih dominan perempuan</li> </ul> <p><b>Partisipasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua siswa memiliki hak yang sama mengikuti OSN</li> </ul> <p><b>Manfaat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih da persepsi bahwa siswa perempuan lebih rajin dibanding laki-laki.</li> <li>- Tidak adanya sosialisasi ttg gender di sekolah</li> <li>- Siswa laki-laki lebih dominan dalam menjuarai OSN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekolah lebih dominan mengirim siswa perempuan</li> <li>- Persyaratan yang diminta tidak mempertegas tentang jenis kelamin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan peran siswa laki-laki dalam mengikuti OSN</li> </ul>	<p><b>Kegiatan 1 Olimpiade Sain Nasional (OSN) tingkat SD</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah yang juara 6 orang laki-laki (matematika=3 dan IPA=3 orang)</li> </ul>	<p><b>Kegiatan 1</b></p> <p><b>Input : tersedi Padang Pariaman OSN propinsi</b></p> <p><b>Output : Adany padang pariama tingkat propins</b></p> <p><b>Outcome : meningkatnya p siswa SD padan pariaman</b></p>

**KERTAS KERJA PENGAWASAN (KKP)**

<b>SKPD</b>	Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman	<b>No. Indek KKP</b>	<b>( 1 )</b>
		Disusun oleh/Tanggal	<b>( 2 )</b>
		Direvisi oleh/Tanggal	<b>( 3 )</b>
		Disetujui oleh/Tanggal	<b>( 4 )</b>
<b>Nama SKPD</b>	Inspektorat Daerah		
<b>Hasil Pengawasan</b>	Lisa Sefita		
<b>a</b>	<p><b>Ketersediaan Lembar GBS</b>                  Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sudah melampirkan Data Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) Pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Gender dan di implementasikan pada Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala</p>		
<b>b</b>	<p><b>Kualitas GBS</b>                  Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala bertujuan agar terlaksananya Pengawasan Internal Secara Berkala</p> <p>Data Pembuka Wawasan telah menggambarkan Analisa Situasi tentang pentingnya kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dimana perlunya dilaksanakan reviu terhadap OPD yang telah melakukan Perencanaan Anggaran yang Responsif Gender</p> <p>Faktor kesenjangan dalam program ini adalah :</p> <p>a). Akses, belum adanya sosialisasi penyusunan GAP/GBS.                  b). Kontrol, belum adanya kegiatan reviu GAP/GBS tercantum dalam PKPT                  c). Manfaat, tidak ada sanksi yang diberikan pada OPD yang tidak melakukan GAP/GBS</p> <p>Sebab kesenjangan Internal karena : APIP belum memahami Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2014 hal ini telah relevan dengan GAP dan menyangkut akses, kontrol dan manfaat sehingga menjadi dasar adanya kesenjangan internal.</p> <p>Kesenjangan eksternal yang terdapat pada Inspektorat adalah sebagai berikut : kurangnya sosialisasi dari Kementerian PPPA sehingga Reviu belum terlaksana secara optimal.</p> <p>Reformulasi tujuan sudah mulai relevan dan Rencana Aksi sudah Relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan pengawasan internal secara berkala.</p> <p>Basis Data yang disadur dari Data Pembuka Wawasan sudah Relevan</p> <p>Indikator kinerja yang ditampilkan sudah relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menampilkan Input, Output dan Hasil dari Kegiatan Tersebut</p>		
<b>c</b>	<p><b>Pelaksanaan GBS</b>                  Indikator Ouput sudah bisa dicapai melihat dari :                  Target sudah sesuai dengan Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Program dan Kegiatan                  Pencapaian target sudah didukung dengan penyediaan dana atau input sebesar Rp500.000.000,00                  sasaran kegiatan sudah sesuai dengan isu gender dilihat pada data pembuka wawasan yang ada pada GAP</p>		
<b>Simpulan</b>			
Dapat disimpulkan pada Inspektorat Daerah Ketersedian GBS, Kualitas dan Pelaksanaan GBS sudah baik dibuktikan dengan GAP yang sudah Relevan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan.			
<b>Komentar</b>			
Data GAP yang ditampilkan sudah Relevan dengan Kegiatan namun masih ada masalah internal yang ditemui yaitu belum terlaksana reviu secara optimal karena APIP kurang memahami Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2014 disebabkan kurangnya sosialisasi dari Kementerian PPPA			

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : INSPEKTORAT

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
KEBUJAKAN/ PERATURAN/ PROGRAM	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBUJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESEJANGKAPAN	SEBAB INTERNAL	SEBAB EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	BASE LINE DATA	INDIKATOR KINERJA
<p><b>Program : peningkatan sistem pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanan Kebijakan KDH</b></p> <p>Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala</p> <p>Tujuan : Terlaksananya Pengawasan Internal Secara Berkala</p>	<p>1. Jumlah dokumen perencanaan yang akan direviu</p> <p>2. Belum terlaksananya reviu GAP/GBS</p> <p>Belum adanya kegiatan reviu GAP/GBS</p>	<p><b>Akses :</b> Belum adanya sosialisasi penyusunan GAP/GBS.</p> <p><b>Kontrol :</b> 1. Belum adanya kegiatan reviu GAP/GBS tercantum dalam PKPT.</p> <p><b>Manfaat :</b> tidak ada sanksi yang diberikan pada OPD yang tidak melakukan GAP/GBS</p>	<p>Inspektorat belum memahami Permen PPPA No 4 tahun 2014</p>	<p>Sosialisasi dari kementerian PPPA kurang sehingga reviu belum terlaksana secara optimal</p>	<p>Terlaksananya Pengawasan Internal Secara Berkala</p>	<p>1. Menyusun PKPT berbasis gender</p> <p>2. Peningkatan kapasitas APIP perempuan dalam pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH</p> <p>3. Sosialisasi Permen PPPA No 4 tahun 2014</p>	<p>Belum terlaksananya reviu GAP/GBS</p> <p>Belum adanya kegiatan reviu GAP</p> <p>Belum adanya OPD yang telah membuat GAP/GBS pada masing-masing OPD</p>	<p>Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala</p> <p>Input : Rp. 500.000.000,-</p> <p>Output : terlaksananya Kapabilitas APIP</p> <p>Outcome : Menurunnya temuan BPK yang bersifat material.</p>